



# RPJPD

## Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 - 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 100 Banyuwangi**  
**Tahun 2011**





BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DAN  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II  
PROGRAM PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 2

RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

BAB VI ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut RPJP Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III  
KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah disusun dengan mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025.

**Bagian Kedua**

**Fungsi**

**Pasal 5**

RPJP Daerah berfungsi:

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
- b. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (2) Apabila terdapat perbedaan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

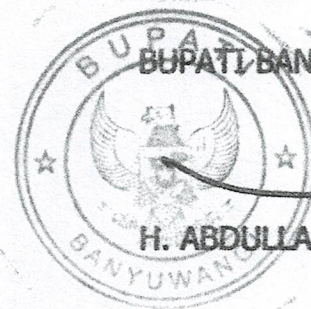
**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Oktober 2011



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. EPH. SUKANDI, M.M.

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 4/E



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

=====

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
C. Hubungan Antar Dokumen.....	4
D. Sistematika Penulisan .....	8
E. Maksud dan Tujuan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	11
A. Aspek Geografi dan Demografi.....	11
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	14
C. Aspek Pelayanan Umum .....	25
D. Aspek Daya Saing Daerah .....	30
<b>BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	39
A. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	39
B. Isu-isu Strategis .....	50
<b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....</b>	54
A. Visi.....	54
B. Misi .....	56
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG .....</b>	66
A. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 .....	66
B. Tahapan dan Prioritas .....	80
<b>BAB VI KAJIAN PELAKSANAAN .....</b>	88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kurun waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan kurun waktu 1 tahun. Kewenangan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya diperkuat dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintahan Daerah*, dalam hal ini termasuk Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Dokumen perencanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun rangkaian dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) merupakan perencanaan makro yang bersifat tidak operasional dan berwawasan dua puluh tahun kedepan. RPJP daerah ini memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari RPJP Daerah memuat visi, misi, gambaran umum kondisi saat ini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan;
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang berisi penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

4. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan;
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten Banyuwangi, didasarkan pada rumusan visi, misi dan arah kebijakan umum hasil dari konsensus pemangku kebijakan di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penyusunan RPJP Daerah juga berpedoman pada: (a) RPJP Nasional yang berisi beberapa fokus pembangunan yang ditetapkan mengacu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah, diantaranya peningkatan investasi, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui berbagai strategi *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*; (b) RPJP Provinsi mempunyai arah pada terciptanya koordinasi antar daerah, efisiensi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (c) Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi dalam upaya menjaga pembangunan berkelanjutan dari sisi kewilayahan; dan (d) Berbagai kebijakan dan program prioritas baik pada level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Hal ini ditujukan untuk merujuk semua dokumen perencanaan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar berbagai level pemerintahan.

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, terutama untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan/atau faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan dan modal dasar dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan dan menetapkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat (partisipatif). Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan mengakomodasi rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJPD dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan.

Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dijadikan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Timur dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD ini merupakan pedoman dan harus dijabarkan kedalam visi, misi, arah kebijakan dan program serta target indikator pembangunan jangka menengah pada RPJMD, sehingga terdapat keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah. Siapa pun yang akan memimpin Banyuwangi kedepan diharapkan mengikuti dan menjabarkan amanat dalam RPJPD ini.

## **B. Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi ini dilandasi oleh beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.

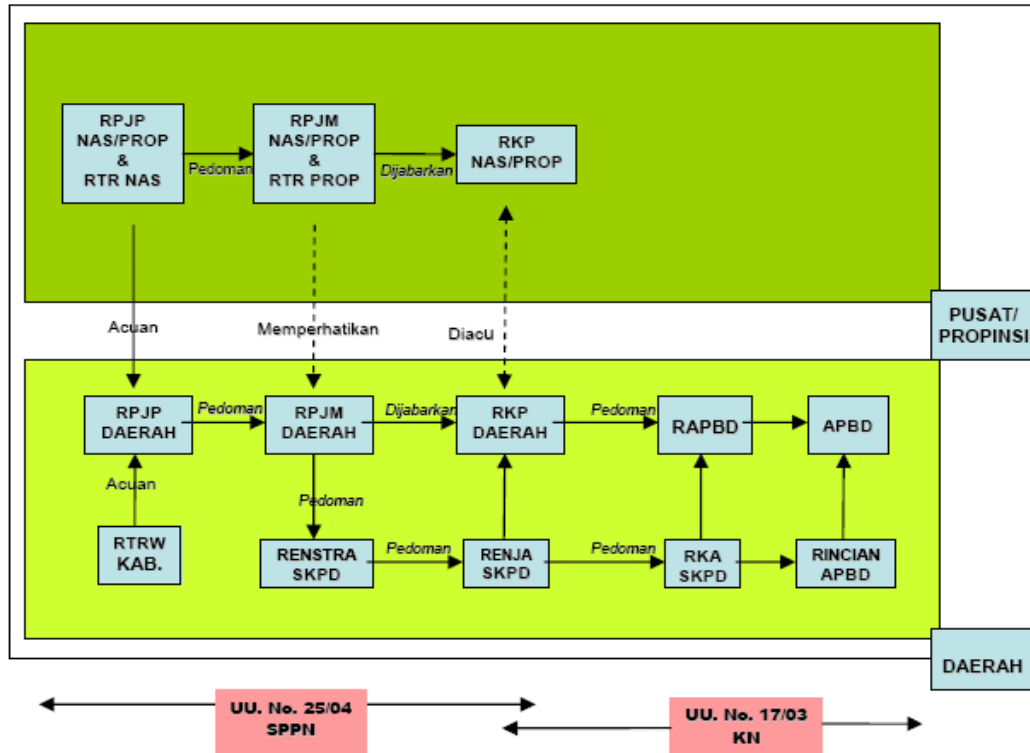
### **C. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Banyuwangi berpedoman, mengacu dan memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lokal maupun pusat. Di tingkat lokal, RPJP Daerah berpedoman dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi, Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan keterkaitan dengan level pemerintah pusat adalah RPJPD Kabupaten Banyuwangi ini berpedoman pada Rencana Tata Ruang Nasional dan RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam



aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah.

Keterkaitan antara RPJP Kabupaten Banyuwangi dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Banyuwangi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2005-2025 merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RPJPD Kabupaten Banyuwangi berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### 1. RPJP Nasional

RPJP Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa visi Indonesia tahun 2010-2014 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, serta dengan misi : 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang

bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa; 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri; 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta; 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas

kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan; 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

## 2. RPJMD Provinsi Jawa Timur

RPJM Daerah Jawa Timur 2009-2014 memiliki visi : Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”, dan mempunyai misi 1) Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis, dicapai dengan cara mendorong pergeseran Agrobisnis dari berbasis pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ke arah Agrobisnis yang didorong oleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) melalui pengembangan modal dan peningkatan kemajuan teknologi pada setiap sub-sistemnya, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia; 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup. dicapai dengan cara mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas; 4) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan dicapai dengan cara menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan; 5) Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi, dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi (*agropolitan*) dan distribusi (*metropolitan*) serta mengurangi ketimpangan antar wilayah; dan 6) mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur,

stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban serta konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM

### 3. RTRW Provinsi Jawa Timur

Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang cukup terkait dengan Kabupaten Banyuwangi adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan pemukiman pedesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di pedesaan dan perkotaan.

Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat pemukiman perkotaan yang dibagi dalam 9 SWP yaitu 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, 8) SWP Banyuwangi, 9) SWP Madura dan Kepulauan. Sedangkan kedudukan Kabupaten Banyuwangi di dalam orde-orde perkotaan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam Orde II-B yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang sistem metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

### 4. RTRW Kabupaten Banyuwangi

Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah harus memperhatikan konsep penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam dokumen RTRW. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi pengembangan kawasan pertanian; pengembangan kawasan perikanan; pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa; pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa serta pelayanan dasar masyarakat; pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam; pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis; pengendalian dan pelestarian kawasan lindung; dan pengendalian kawasan rawan bencana alam.

## D. Sistematika Penulisan

Tata urutan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 disusun dengan mengacu pada tata urutan RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa RPJP Nasional merupakan induk yang tidak terpisahkan

dengan RPJP Daerah. Pola pengembangan dan isi disesuaikan dengan muatan dan unsur yang dimiliki. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, dasar hukum, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lain, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi yang mencakup (a) Karakteristik Lokasi dan Wilayah; (b) Potensi Pengembangan Wilayah; (c) Wilayah Rawan Bencana; dan (d) Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum dan (4) Aspek Daya Saing Daerah.

## **BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan di masa mendatang termasuk pembahasan terhadap: (1) Permasalahan Pembangunan dan (2) Isu-isu Strategis. Analisis yang dilakukan meliputi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah, Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah, Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penelaahan RPJMN dan RPJMD Daerah Sekitar serta Penelaahan RPJPD Provinsi.

## **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Memaparkan Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 serta keterkaitannya dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur.

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

Bab ini menggambarkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta tahapan dan prioritas yang ditetapkan.

## **BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN**

Dalam bagian ini perlu ditekankan bahwa RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD dalam kurun waktu lima tahunan serta kaidah pelaksanaan.

## **E. Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 adalah untuk menyediakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyuwangi selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 memuat kondisi umum, visi, misi serta arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu substansi materi RPJPD ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD).

### **1. Maksud**

RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan;
- b. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kondisi, potensi dan prospek pengembangan yang berazaskan kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam periode lima tahunan yang dituangkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Banyuwangi; dan
- e. Menjamin kepastian arah pembangunan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

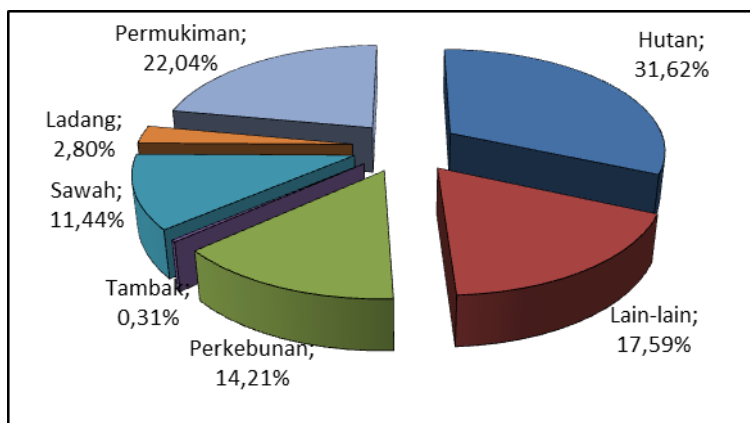
Dalam Bab ini diuraikan secara mendetail mengenai gambaran umum kondisi Kabupaten Banyuwangi. Secara sistematis bahasan diurutkan berdasarkan sub bab aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### A. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup>. Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

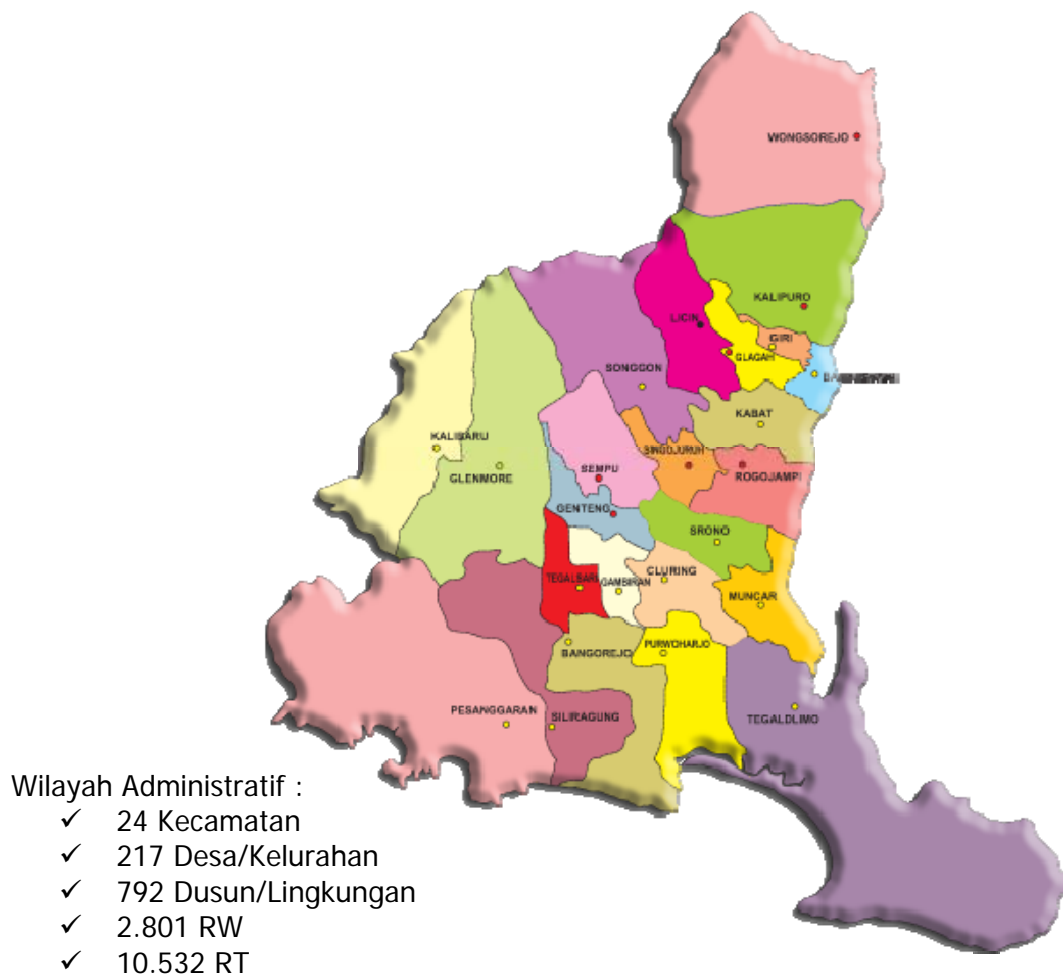
Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7<sup>0</sup> 43' - 8<sup>0</sup> 46' Lintang Selatan dan 113<sup>0</sup> 53' – 114<sup>0</sup> 38' Bujur Timur.



**Diagram 2.1: Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya**

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara  $40^{\circ}$ , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari  $15^{\circ}$ , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga di samping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.



**Gambar 2.1:** Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi



Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.

Di samping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sejumlah 1.554.997 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 0,44 % dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 269 jiwa/km<sup>2</sup>. Meskipun penduduk Kabupaten Banyuwangi belum tergolong padat, namun pertumbuhannya harus dikendalikan agar terpelihara keseimbangannya dengan daya dukung wilayah.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010, masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi masih tertumpu di Kecamatan Muncar yakni sebesar 8,2 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar 6,8 persen, Kecamatan Rogojampi sebesar 5,9 persen, Kecamatan Srono sebesar 5,6 persen, Kecamatan Genteng sebesar 5,3 persen dan kecamatan lainnya di bawah 5 persen. Kecamatan Licin, Glagah dan Giri adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 27.993 orang, 28.295 orang dan 33.984 orang. Sedangkan Kecamatan Muncar dan Banyuwangi merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kabupaten Banyuwangi, yakni masing-masing sebanyak 127.919 orang dan 106.112 orang.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Banyuwangi Hasil Sensus Penduduk 2010

Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	L + P	
1. Pesanggaran	24.553	23.844	48.397	103
2. Siliragung	22.363	21.734	44.097	103
3. Bangorejo	29.894	29.555	59.449	101
4. Purwoharjo	32.404	32.554	64.958	100
5. Tegaldlimo	30.820	30.255	61.075	102
6. Muncar	64.469	63.450	127.919	102
7. Cluring	34.774	35.284	70.058	99
8. Gambiran	28.754	29.503	58.257	97
9. Tegalsari	23.144	23.048	46.192	100
10. Glenmore	33.926	35.309	69.235	96
11. Kalibaru	30.361	31.261	61.622	97
12. Genteng	41.297	41.702	82.999	99

Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	L + P	
13. Srono	43.454	44.054	87.508	99
14. Rogojampi	45.650	46.457	92.107	98
15. Kabat	33.216	33.917	67.133	98
16. Singojuruh	22.064	23.053	45.117	96
17. Sempu	35.574	35.902	71.476	99
18. Songgon	24.752	25.495	50.247	97
19. Glagah	16.585	17.399	33.984	95
20. Licin	13.874	14.119	27.993	98
21. Banyuwangi	51.972	54.140	106.112	96
22. Giri	14.408	13.887	28.295	104
23. Kalipuro	37.727	38.696	76.423	97
24. Wongsorejo	36.710	37.634	74.344	98
Kabupaten Banyuwangi	772.745	782.252	1.554.997	99

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

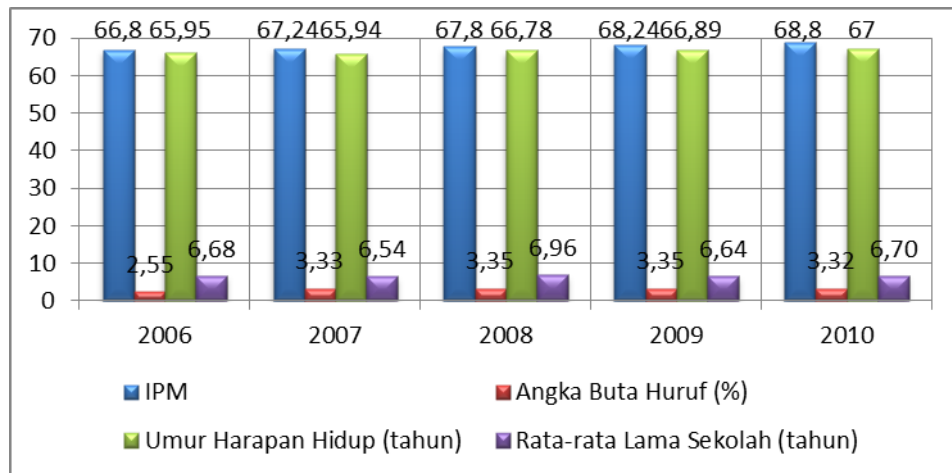
Sex ratio penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 99, yang artinya jumlah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, atau setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Giri yakni sebesar 104 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Glagah yakni sebesar 95.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuwangi per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,44 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kalipuro adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi yakni sebesar 1,72 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Singojuruh yakni sebesar -0,17 persen. Kecamatan Muncar menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 persen.

## **B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, indikator kualitas sumberdaya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu mendapatkan perhatian khusus, karena hal tersebut menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan.

**Diagram 2.2:** IPM, ABH, UHH dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi tahun 2006-2010



Berdasarkan data diatas, pada tahun 2006-2010 IPM Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari 66,8 tahun 2006, meningkat menjadi 67,24 tahun 2007 dan menjadi sebesar 68,8 pada tahun 2010. Peningkatan angka IPM terutama ditopang oleh angka melek huruf (*adult literacy rate*), meningkatnya rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), umur harapan hidup (*life expectancy*) dan daya beli masyarakat (*purchasing power*).

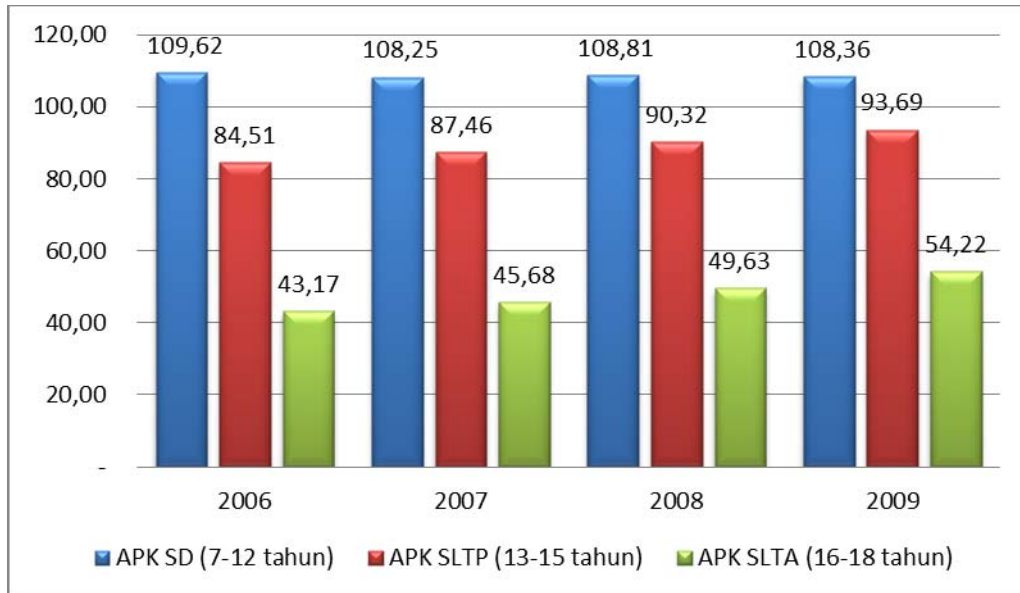
Selama tahun 2006-2010 angka melek huruf di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 sebesar 97,45%, tahun 2007 sebesar 96,67%, tahun 2008 sebesar 99,65% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 99,68%. Pada kurun waktu antara 2006-2010 juga terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2006 rata-rata lama sekolah adalah 6,68 tahun meningkat pada tahun 2010 selama 6,67 tahun.

Selain itu, Umur Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebesar 67 tahun pada 2010 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 sebesar 66,89 tahun, 2008 sebesar 66,78 tahun, meningkat dari tahun 2007 yang hanya sebesar 65,94 tahun.

Sebagaimana pemerintah pusat dan provinsi, pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun. Melalui prioritas ini, pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD, sebagian besar penduduk Kabupaten Banyuwangi sekurang-kurangnya tamat SLTP atau yang sederajat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kondisi di Kabupaten Banyuwangi dapat dijelaskan antara lain melalui Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan dari untuk usia SD (7-12 tahun) dari tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: tahun 2006 sebesar 109,62%, tahun 2007 sebesar 108,25%, tahun 2008 sebesar 108,81%, tahun 2009 sebesar 108,36% dan tahun 2010 sebesar 106,92%. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk usia SLTP (13-15 tahun) sebesar 84,51%, tahun 2006, pada tahun 2007 menjadi sebesar 87,46%, sebesar 90,32% tahun 2008, dan meningkat menjadi sebesar 93,68% pada tahun 2009 serta sebesar 93,78% pada tahun 2010. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk usia SLTA (16-18 tahun) sebesar 43,17 tahun 2006, tahun 2007 sebesar 45,68%, tahun 2008 sebesar 49,63%, tahun 2009 sebesar 54,22% dan tahun 2010

sebesar 56,28%. Secara detail APK SD, SLTP dan SLTA terlihat dari diagram berikut ini:

**Diagram 2.3:**  
APK SLTP dan SLTA Kabupaten Banyuwangi tahun 2006-2010



Di sisi yang lain, lesunya dunia usaha dan rendahnya investasi baru berdampak pada rendahnya pertumbuhan lapangan kerja baru. Padahal jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, tampaknya tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan formal. Kondisi semacam ini memberikan imbas yang cukup berat bagi ketenagakerjaan di Banyuwangi. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari tahun 2006 sebesar 6,71%, pada tahun 2007 menjadi 5,80%, tahun 2008 sebesar 5,62% dan menurun pada tahun 2009 menjadi sebesar 4,05%.

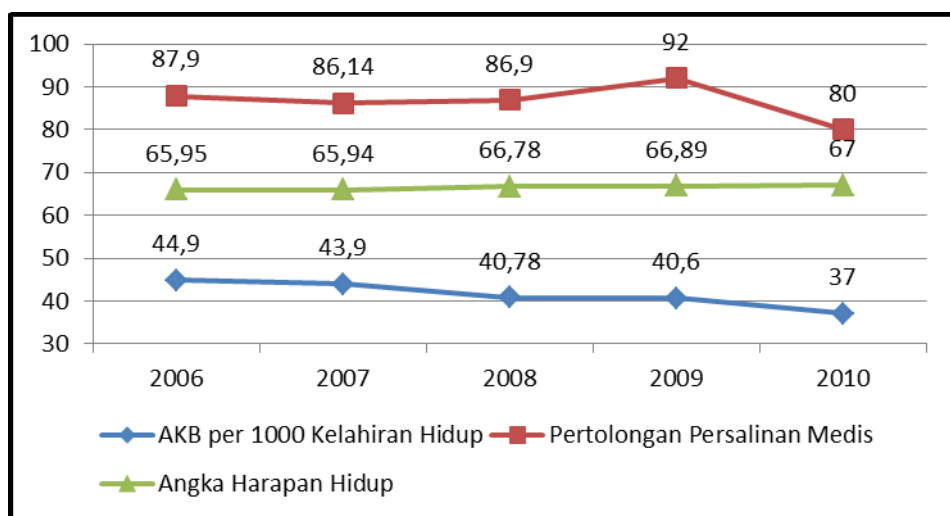
Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang semakin memadai menunjukkan korelasi positif dengan jangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Pertolongan persalinan medis oleh tenaga kesehatan dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 sebesar 46,32. Pada tahun 2006 menurun menjadi sebesar 44,9. Pada tahun 2007 terus menurun menjadi sebesar 43,9. Angka Kematian Bayi menjadi 43,3 tahun 2008, menurun pada tahun 2009 sebesar 40,6 dan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan secara signifikan menjadi 37 pada tahun 2010.

Adapun Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 sebesar 103 menurun menjadi sebesar 97 pada tahun 2009. Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan secara signifikan menjadi 80 pada tahun 2010.

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) sangat terkait dengan upaya pertolongan persalinan medis yang dilakukan. Pertolongan persalinan medis oleh tenaga kesehatan pada tahun 2006 sebesar 87,9% meningkat menjadi sebesar 86,14% pada tahun 2007, meningkat menjadi 86,9% tahun 2008, meningkat sebesar 92,1% pada tahun 2009 dan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 80% pada tahun 2010.

**Grafik 2.1:** AKB, Pertolongan Persalinan Medis dan AHH Kabupaten Banyuwangi tahun 2006-2010



Adapun dukungan infrastruktur/fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, antara lain, mencakup Puskesmas sebanyak 45 buah, Puskesmas Pembantu 105 buah, Puskesmas Keliling 30 buah dan Rumah Sakit Umum/Khusus 11 buah. Rasio Puskesmas dengan penduduk adalah 2,83 per 100.000 penduduk atau setiap Puskesmas melayani sekitar 35.276 penduduk. Rasio Puskesmas Pembantu 6,61 per 100.000 penduduk atau setiap Puskesmas Pembantu melayani 15.118 penduduk.

Dukungan tenaga medis dari tahun juga mengalami peningkatan, dari 117 Orang pada tahun 2006 meningkat menjadi 135 pada tahun 2009, dan menjadi 200 pada tahun 2010. Demikian pula jumlah perawat dan bidan, pada tahun 2006 sebesar 1.010 orang, meningkat menjadi 1.020 tahun 2008 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 1.230 orang.

Sementara itu, pluralitas dalam kehidupan beragama mewarnai masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Penganut agama Islam menduduki posisi terbesar, yakni mencapai 95,24%, disusul pemeluk agama Hindu sebanyak 2.19%, Protestan sebanyak 1,59%, Katolik sebanyak 0,74%, dan pemeluk agama Budha sebanyak 0,5%.

Fasilitas peribadatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data tahun 2009 sebagai berikut: masjid sebanyak 1.695, pura sebanyak 124, gereja sebanyak 137, dan vihara sebanyak 32.

Pada sisi kehidupan umat Islam, jumlah jamaah haji di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Data jamaah haji tahun 2009 (sebanyak 1.067 jamaah) jika dibandingkan dengan jamaah haji tahun sebelumnya meningkat 24%. Mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya berdampak pada dinamika sosial masyarakat yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat. Permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Banyuwangi dapat terlihat pada perkara yang ditangani oleh pengadilan agama dan perkara pidana. Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 telah menerbitkan 1968 akte cerai pada tahun 2008 sebanyak 1.270 dan pada tahun 2009 sebanyak 1.597. Alasan utama dari perceraian tersebut adalah tidak adanya keharmonisan akibat terus menerus berselisih, selain itu disebabkan karena meninggalkan kewajiban, adanya krisis akhlak dan adanya gangguan pihak ketiga.

Sementara perkara pidana yang sering terjadi di Banyuwangi adalah pelanggaran lalu lintas. Hal ini terlihat dari hasil catatan Pengadilan Negeri Banyuwangi dimana pidana lalu lintas telah terjadi sebanyak 14.213 pada tahun 2008, menurun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 20.325 kasus.

Pelanggaran kejahatan masih terus merajalela di wilayah Kabupaten Banyuwangi terutama perjudian dan pencurian, hal ini tercermin dari jumlah narapidana yang diputus karena kriminalitas (kejahatan) sebesar 4.137 meningkat dari menjadi sebesar 4.712 pada tahun 2007. Demikian pula jumlah narapidana yang diputus karena pelanggaran sebesar 18 orang pada tahun 2007 meningkat dari menjadi sebesar 21 orang pada tahun 2008.

Unjuk rasa di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar dilakukan oleh LSM dan masyarakat umum, dan selebihnya dilakukan oleh mahasiswa/pelajar. Jumlah unjuk rasa tahun 2005 dilakukan oleh 8.626 orang dan puncaknya pada tahun 2006 dilakukan oleh 18.995 orang dan kemudian menurun pada tahun 2007 menjadi sebesar 11.859 orang.

Kondisi perekonomian daerah secara makro di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2005 hingga 2010 menunjukkan pergerakan yang stabil. Hal ini dapat ditunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2005 sebesar 4,58% menjadi 5,07% pada tahun 2006, menjadi 5,59% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 5,76% pada tahun 2008. Pada tahun krisis keuangan global yang tengah berlangsung sehingga menyebabkan macetnya sistem keuangan dunia sehingga menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dan volume perdagangan dunia hingga tahun 2009 terus merosot. Kelesuan perekonomian global yang juga menerpa perekonomian Indonesia juga memberikan dampak pada perlambatan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Akibat melemahnya nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan kenaikan inflasi telah menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat terutama di perkotaan. Di Kabupaten Banyuwangi, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merosot menjadi sebesar 5,39%. Meskipun demikian terpaan krisis telah menunjukkan perekonomian Banyuwangi tetap bertahan sehingga tidak sampai pada posisi stagnan atau minus. Hal ini disebabkan bahwa perekonomian di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak ditopang oleh sektor riil. Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi juga dapat ditunjukkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Konstan pada tahun 2000 (PDRB ADHK). Sejak tahun 2006 hingga 2010, PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi mengalami

peningkatan yang signifikan dari tahun 2005 sebesar Rp 8,39 trilyun meningkat menjadi Rp 8,8 trilyun pada tahun 2007 dan menjadi Rp 11,082 triliun pada tahun 2010. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2:**  
PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2010

No.	Sektor	Realisasi Kondisi					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	PERTANIAN	4.178.474,97	4.371.508,37	4.610.837,91	4.852.070,74	5.103.032,41	5.450.548,92
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	335.450,56	354.370,48	375.773,94	400.032,86	423.434,92	452.270,83
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	500.095,16	517.825,45	538.906,54	561.314,48	584.865,55	624.694,90
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	52.475,13	55.266,02	58.347,90	61.668,00	65.285,61	69.731,56
5.	BANGUNAN	26.729,36	28.164,25	30.043,75	32.116,82	33.266,67	35.532,13
6.	PERDAG., RESTORAN & HOTEL	1.887.714,39	2.025.100,05	2.171.970,61	2.334.754,61	2.495.797,21	2.665.761,00
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	372.265,76	390.056,18	405.812,29	429.048,29	448.265,29	478.792,15
8.	BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN	574.935,64	591.591,24	613.594,18	643.935,42	666.921,31	712.338,65
9.	JASA-JASA	462.701,85	482.045,10	503.778,56	530.111,77	554.832,38	592.616,47
	<b>TOTAL</b>	<b>8.390.842,8</b>	<b>8.815.927,1</b>	<b>9.309.065,6</b>	<b>9.845.052,9</b>	<b>10.375.701,3</b>	<b>11.082.286,6</b>
	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>4,58%</b>	<b>5,07%</b>	<b>5,59%</b>	<b>5,76%</b>	<b>5,39%</b>	<b>6,81%</b>

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional yang sangat dipengaruhi perekonomian dunia. Resesi ekonomi di berbagai belahan dunia berimbas pula ke termasuk Indonesia. Terdapat pengaruh bagi kondisi perekonomian Banyuwangi meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak ditopang oleh sektor riil. Krisis ekonomi yang terjadi tidak memberikan pengaruh langsung bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Di samping itu, kurangnya pengaruh disebabkan keterkaitan antara UMKM dan koperasi dengan perekonomian global yang masih sangat terbatas. Orientasi sebagian besar UMKM dan koperasi pada pasar lokal menyebabkan UMKM dan koperasi relatif lebih bisa bertahan dalam kondisi krisis ekonomi saat ini. Berdasarkan data BPS terdapat 96,2% UMKM yang tidak berbadan hukum dan bergerak di sektor-sektor non pertanian yang masih memasarkan produknya hanya sebatas di dalam wilayah kabupaten. Sisanya memasarkan produknya antar provinsi (2,4%) dan antar negara (0,13%). Kondisi ini terkait dengan jenis dan kualitas produk dan jasa yang disediakan oleh UMKM dan koperasi yang pada umumnya baru bisa menjangkau standar dan konsumen di pasar lokal dan regional.

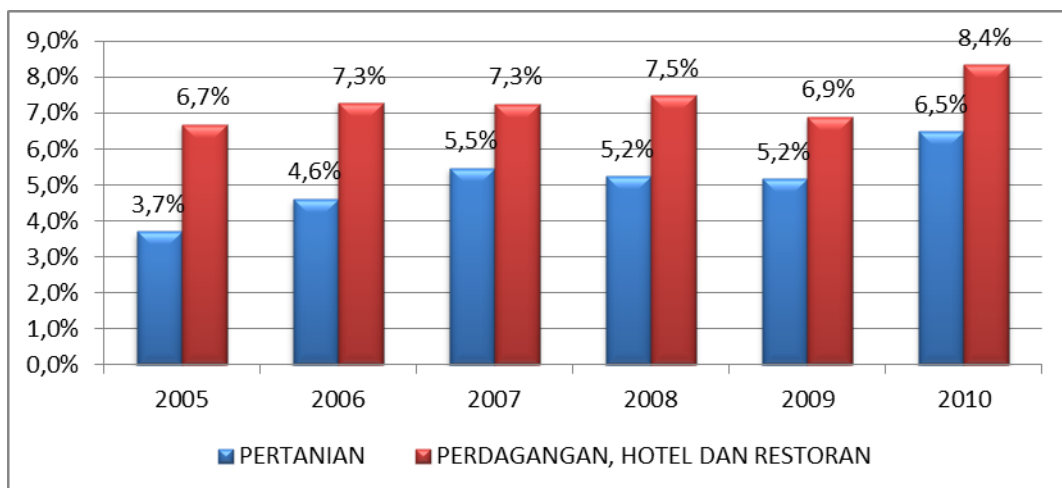
Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasar PSE tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 463.196 atau sejumlah 157.347 RTM. Selanjutnya adapun berdasarkan hasil PPLS tahun 2008,

jumlah Rumah Tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar 129.324 keluarga dengan jumlah penduduk miskin sebesar 312.395 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut terutama ditopang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mampu tumbuh rata-rata di atas 7% setiap tahunnya. Pada tahun 2006, sektor ini yang hanya tumbuh 7,28%, meningkat secara signifikan menjadi 7,49% pada tahun 2008, dan menjadi 8,35% tahun 2010. Sementara sektor paling besar yang menopang adalah sektor pertanian yang mempunyai kontribusi paling besar sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian sektor ini tumbuh berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten. Pada tahun 2006, sektor ini tumbuh sebesar 4,62%, pada tahun 2007 sebesar 5,47, dan meningkat menjadi 6,49% tahun 2010. Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan namun sektor ini tetap menjadi sektor paling dominan dengan angka tiap tahunnya mendekati 50% atau separo nilai PDRB total Kabupaten Banyuwangi.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh Sektor Pertanian mempunyai peran sektoral PDRB yang paling besar mencapai diatas 49%, yang diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2006, kontribusi sektor pertanian mencapai 49,59%, pada tahun 2007 sebesar 49,53%, pada tahun 2008 menjadi sebesar 49,28%, pada tahun 2009 menjadi sebesar 49,18%, dan pada tahun 2010 menjadi 49,0% . Adapun kontribusi sektor perdagangan, restoran dan hotel sebagai sektor prioritas kedua, memberikan kontribusi pada PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2006 mencapai 22,97%, pada tahun 2007 sebesar 23,33%, pada tahun 2008 menjadi sebesar 23,72%, meningkat signifikan pada tahun 2009 sebesar 24,05% dan meningkat signifikan pada tahun 2010 menjadi sebesar 24,4%.

**Tabel 2.3**  
Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor  
Kabupaten Banyuwangi tahun 2006-2010

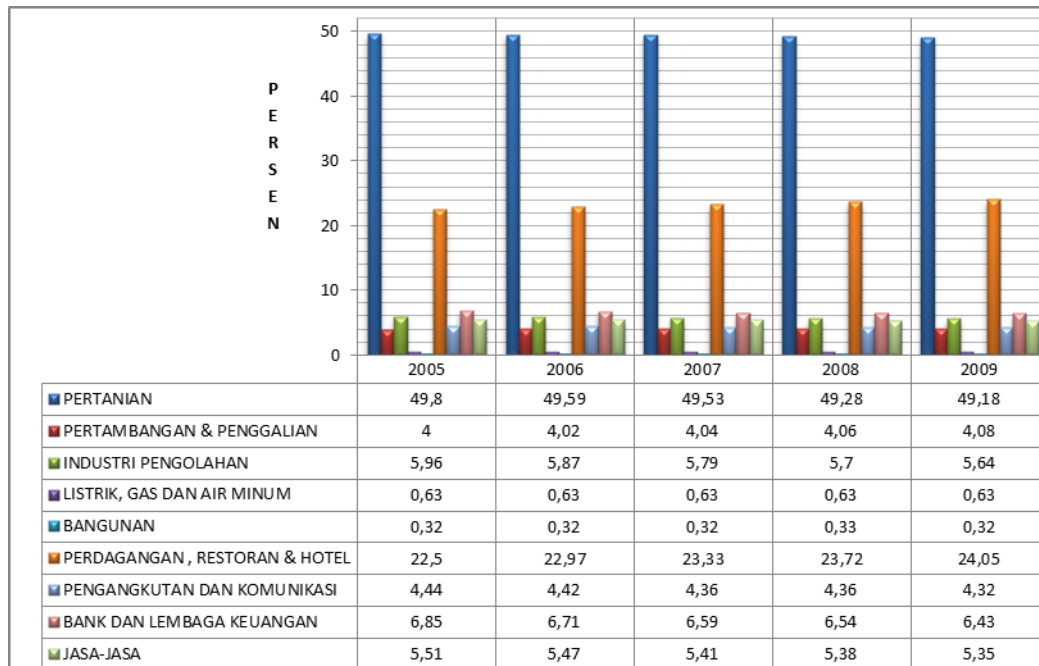


Oleh sebab itu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diletakkan pada prioritas utama untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian termasuk perikanan dan kelautan dengan didukung peningkatan nilai



tambah yang lebih tinggi dari jasa perdagangan, hotel dan restoran. Secara rinci kontribusi sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
Kontribusi Sektor-Sektor dalam PDRB ADHK  
Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2009



Dari sisi pengeluaran, investasi dan belanja daerah menjadi penggerak utama perekonomian dengan didorong oleh konsumsi masyarakat. Sedangkan dari sisi produksi, sektor pertanian dan perdagangan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah terus mengupayakan serangkaian kebijakan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan sekaligus mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja APBD Kabupaten Banyuwangi diarahkan lebih bersifat ekspansif untuk (1) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat; serta (2) meningkatkan daya serap tenaga kerja melalui kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi infrastruktur padat karya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi dan penghematan dalam belanja untuk menjaga defisit anggaran dalam batasan yang aman.

Kondisi di atas menunjukkan adanya stabilitas ekonomi makro Kabupaten Banyuwangi. Kestabilan ekonomi makro adalah batu pijakan bagi keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sangat terkait dengan pengeluaran per kapita masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah (bukan hanya karena mereka menganggur). Pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan produktivitas pekerjaan yang mereka lakukan juga rendah, yang antara lain disebabkan sumber daya manusia yang sangat rendah. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja terus diupayakan agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Pada saat yang sama, masyarakat

yang tinggal di daerah pedesaan dan yang sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian, juga terus diupayakan agar mempunyai pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana memacu peningkatan produktivitas pertanian. Pembangunan yang besar di bidang infrastruktur telah dan perlu terus ditingkatkan ditunjang dengan layanan penyuluhan pertanian yang efektif. Upaya yang terus ditingkatkan untuk menghubungkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dengan berbagai peluang. Pada sebagian penduduk di daerah pedesaan bukan hanya tidak memiliki kemampuan, mereka juga tidak memiliki sarana untuk terhubung dengan pertumbuhan. Kadang-kadang kaitan yang hilang itu bersifat fisik. Sebagai contoh; akses ke pasar di beberapa daerah pedesaan terkendala oleh kualitas jalan yang buruk di tingkat kecamatan. Pada tahun 2006 hingga tahun 2009, hal ini terus diupayakan antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program P2JD, P2JD plus. Upaya lainnya juga terus ditingkatkan antara lain meningkatkan akses rumah tangga miskin untuk memperoleh kredit, antara lain karena mereka tidak mempunyai jaminan, dan meningkatkan akses penduduk di daerah perkotaan yang mengalami kesulitan terhadap pasar tenaga kerja.

Berdasarkan tinjauan pembangunan wilayah, telah dilakukan berbagai upaya antara lain; pertama, daerah perkotaan yang telah dan terus dipersiapkan baik secara politik maupun ekonomi, untuk menyerap ekonomi di daerah-daerah sekitarnya (*hinterland*) yang sedang tumbuh pesat. Kedua, kendala-kendala atas pertumbuhan usaha non-pertanian di daerah pedesaan telah diatasi bagi daerah-daerah yang belum terserap dalam pertumbuhan daerah perkotaan. Dengan kata lain, perbaikan kondisi perekonomian di pedesaan menjadi faktor penentu bagi pengurangan angka kemiskinan, meskipun pada akhirnya usaha-usaha pedesaan itu berubah menjadi usaha-usaha perkotaan. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi jalan keluar penting dari peningkatan perekonomian di pedesaan.

Namun demikian kegiatan pedesaan nonpertanian juga dapat menjadi batu pijakan peningkatan perekonomian di wilayah pedesaan. Sudah cukup banyak masyarakat yang meningkat kondisi ekonominya, meskipun tetap tinggal di daerah pedesaan. Karena itu, kebijakan pemerintah daerah diarahkan mendorong proses transformasi pedesaan. Di daerah pedesaan, telah terjadi diversifikasi bertahap atas kegiatan-kegiatan ekonomi, yang ditandai dengan adanya ketergantungan pada sumber penghasilan nonpertanian. Proses diversifikasi pedesaan ini mencerminkan kesempatan yang lebih besar untuk pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi nonpertanian yang dinamis dibandingkan dalam kegiatan pertanian itu sendiri, meskipun peningkatan produktivitas pertanian masih dipandang sebagai jalan keluar yang paling utama. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah sangat berperan dalam usaha peningkatan usaha pertanian dan nonpertanian, dan juga dalam usaha menghubungkan masyarakat dengan pekerjaan yang lebih baik.

Di samping itu, melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tampaknya telah dapat memberi hasil yang tinggi. Upaya pendidikan khususnya dengan memacu pendidikan tingkat dasar ke tingkat menengah serta meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah menengah di daerah pedesaan, menjadi kunci untuk mendongkrak kemampuan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Perbaikan akses khusus informal dapat juga membantu peningkatan kemampuan produktif masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Menghubungkan

masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dengan peluang-peluang bagi pertumbuhan adalah upaya yang sangat penting. Dampak 'keterhubungan' juga tinggi, khususnya bagi lapangan kerja sektor formal di luar pertanian. Akses terhadap jalan beraspal sama halnya dengan akses terhadap permodalan di beberapa wilayah. Bagi sebagian besar masyarakat bukan petani melihat bahwa kendala-kendala terpenting yang mereka hadapi terkait dengan: rendahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi, kesulitan memperoleh kredit, dan masalah pemasaran akibat buruknya jalan, transportasi dan infrastruktur listrik.

Selain itu, ada beberapa langkah kebijakan ekonomi mikro yang penting yang telah dilakukan untuk mendukung berbagai jalan keluar guna peningkatan perekonomian masyarakat. Pertama, upaya memacu produktivitas masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor pertanian di daerah pedesaan melalui peningkatan akses mereka terhadap pengetahuan dan teknologi pertanian serta upaya peningkatan layanan penyuluhan pertanian. Intervensi yang telah dilakukan antara lain melalui perbaikan jalan pedesaan, serta perbaikan akses terhadap listrik dan irigasi di sebagian kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Kedua, upaya memacu produktivitas masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor nonpertanian. Yang perlu ditekankan di sini adalah upaya melalui peningkatan pendidikan yang lebih baik agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta peningkatan pelatihan kerja. Akan tetapi, usaha-usaha nonpertanian yang mempekerjakan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah seperti itu juga telah dihubungkan secara lebih baik dengan kutub-kutub pertumbuhan di kota Banyuwangi, Genteng, Rogojampi, Jajag, dan Muncar. Upaya memacu produktivitas masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor nonpertanian di daerah perkotaan juga memerlukan penekanan pada pendidikan dan pelatihan kejuruan. Namun, cara menghubungkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dengan pertumbuhan sedikit berbeda dengan cara di daerah pedesaan. Meskipun perbaikan infrastruktur masih cukup penting bagi peningkatan perekonomian di daerah perkotaan yang paling dibutuhkan adalah menghubungkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah perkotaan dengan pasar kerja formal.

Upaya perbaikan akses kredit permodalan telah terbukti sangat membantu menghubungkan kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tersebut dengan berbagai peluang. Petani membutuhkan modal untuk membiayai berbagai sarana produksi pertanian; usaha nonpertanian di daerah pedesaan sangat mengalami kendala akses modal. dan usaha di daerah perkotaan; khususnya usaha mikro dan kecil yang melibatkan sebagian besar penduduk miskin, juga mengalami kendala untuk mendapatkan kredit modal. Karena itu, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses kredit komersial ini mungkin merupakan bagian penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

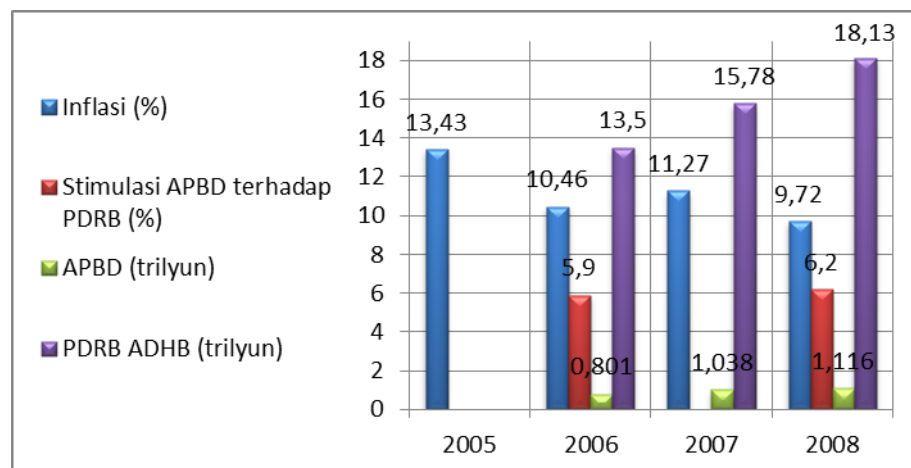
Stabilitas pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di setiap wilayah. Akibatnya, terjadi proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Sejak tahun 2005 hingga tahun

2007, laju inflasi mengalami fluktuasi dan kondisinya berada di atas 10%, tahun 2005 sebesar 13,43%, menurun pada tahun 2006 menjadi 10,46%, dan meningkat lagi tahun 2007 menjadi sebesar 11,27%. Laju inflasi ini kemudian dapat dikendalikan dan mengalami penurunan menjadi di bawah 10 % pada tahun 2008 tepatnya berada pada level 9,72% (lihat diagram 2.1). Dengan inflasi pada kisaran tersebut, justru diharapkan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian daerah lebih baik, yaitu membuat masyarakat bergairah untuk bekerja dan melaksanakan diversifikasi usaha, menabung dan mengadakan investasi yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Meskipun demikian kondisi ini (kisaran 10%) tetap terjaga dan tidak sampai terjadi inflasi yang tak terkendali (hiperinflasi). Yang terakhir ini berpotensi menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi di mana para pelaku ekonomi enggan untuk melakukan aktifitas dalam perekonomian serta menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Tetapi, karena inflasi relatif terkendali, kecenderungan demikian relatif bisa dikendalikan juga.

Peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi seiring dengan stimulasi APBD pada PDRB. Pada tahun 2006 peran APBD terhadap PDRB sebesar 5,9%, meningkat pada tahun 2008 menjadi sebesar 6,2%. APBD tahun 2006 sebesar Rp 801,7 milyar dengan total PDRB ADHB sebesar Rp 13,5 trilyun. Angka ini meningkat pada tahun 2007 dengan jumlah APBD sebesar Rp 1,038 trilyun dengan total PDRB ADHB sebesar Rp 15,78 trilyun. Pada tahun 2008 APBD sebesar Rp 1,116 trilyun dengan total PDRB ADHB sebesar Rp 18,134 trilyun.

**Diagram 2.4:** Tingkat Inflasi, APBD dan PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2008



Peningkatan perekonomian juga nampak dari meningkatnya indeks daya beli masyarakat. Pada tahun 2005 indeks daya beli sebesar 55,7 meningkat menjadi 63,52 tahun 2007, menjadi sebesar 65 pada tahun 2008.

Peningkatan PDRB di Kabupaten Banyuwangi disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan antar daerah. Di sektor investasi pada tahun 2009 terdapat penurunan modal asing

sebesar US \$ 300.000, dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 130,38 milyar.

Pada tahun 2009 angka pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi tercatat sekitar Rp,12.444.122,71 yang mengandung maksud bahwa dari seluruh penduduk Kabupaten Banyuwangi diperkirakan mempunyai pendapatan rata-rata dalam setahunnya sebesar Rp, 12.444.122,71. Angka pendapatan per kapita ini naik sekitar 12,61 persen bila dibandingkan dengan angka pendapatan per kapita tahun 2008. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa angka pendapatan per kapita bisa diinterpretasikan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan demikian apabila angka pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 naik sebesar 12,61 persen, maka sama artinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi naik sebesar 12,61 persen.

Sejak tahun 2005 hingga 2009 kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Banyuwangi tampak lebih baik searah dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur, tetapi setelah memasuki tahun 2006 hingga 2007 keadaannya berubah menjadi lebih lambat terhadap angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Memasuki tahun 2008 hingga 2009 Indeks Daya Beli penduduk Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih baik meskipun masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Bahkan apabila secara grafis ini selalu menunjukkan pola yang menurun, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Banyuwangi akan semakin tertinggal bila dibandingkan dengan kemampuan daya beli rata-rata penduduk Provinsi Jawa Timur.

### **C. Aspek Pelayanan Umum**

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global yang tanpa batas. Pada tahun 2009 jumlah fisik sekolah, murid dan guru untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) masih mempunyai kecenderungan yang meningkat baik berstatus negeri maupun swasta. Bahkan keberadaan TK ini penyebarannya sudah bisa ditemui di setiap desa/kelurahan dengan jumlah sedikitnya ada satu lembaga sekolah. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mempunyai kecenderungan jumlah lembaganya menurun dengan jumlah murid yang menurun pula. Penurunan jumlah lembaga SDN belakangan ini sebagai akibat dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menyatukan dua SDN menjadi satu SDN, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan jumlah murid pada SDN yang ada di bawah standar kecukupan sehingga perlu adanya efisiensi.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat jumlah sekolah negeri perkembangannya terus bertambah, yang diikuti dengan naiknya jumlah SMP sederajat yang dikelola oleh pihak swasta. Pada sisi lain program pendidikan dasar atau yang lebih sering disebut-sebut dengan istilah Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, secara kelembagaan di Kabupaten Banyuwangi sudah dapat dikategorikan cukup memadai, karena dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi seluruhnya sudah mempunyai SMP bahkan jumlahnya minimal ada satu SMP yang berstatus negeri. Pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi yang disebut dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Lembaga SMA sederajat sampai dengan tahun 2009, keberadaannya di setiap kecamatan sudah relatif merata karena dari setiap kecamatan yang ada umumnya sudah mempunyai lembaga SMA sederajat minimal ada satu SMA baik negeri maupun swasta.

Apabila setiap jenjang sekolah dari SD sederajat hingga SMA sederajat dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah lembaganya diperoleh bahwa, 5:1 untuk SD sederajat terhadap SMP sederajat, serta 2:1 untuk SMP sederajat terhadap SMA sederajat. Sedang perbandingan untuk jumlah muridnya diperoleh sekitar 3:1 untuk SD sederajat terhadap SMP sederajat, serta ada sekitar 2:1 untuk SMP sederajat terhadap SMA sederajat. Arti dari angka perbandingan tersebut bisa dimaknai bahwa dari setiap jumlah lulusan 5 SDN sederajat yang bisa meneruskan dan tertampung di SMP sederajat jumlahnya baru sekitar sepertiganya. Dan dari setiap jumlah lulusan 2 SMP sederajat yang bisa meneruskan dan tertampung di SMA sederajat jumlahnya baru sekitar separuhnya.

Fasilitas pendidikan yang menjadi perhatian penting guna menunjang penyelenggaraan pendidikan khususnya kondisi fisik bangunan sekolah. Kondisi fisik bangunan sekolah yang baik menunjukkan kapasitas daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan di bidang pendidikan. Pada tahun 2006 kondisi bangunan sekolah SD/MI 77,93 persen baik. Kondisi ini meningkat pada tahun 2010 menjadi 81,03 persen. Di tingkat SLTP, tahun 2006 kondisi sekolah berkualitas baik sebesar 82,83 persen baik, meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 83,51 persen. Di tingkat SLTA, pada tahun 2008 kondisi sekolah berkualitas baik sebesar 80,78 persen baik, meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 81,2 persen, dan menjadi 81,62 persen pada tahun 2010. Ditunjang oleh guru yang mencukupi, maka diharapkan pelayanan pendidikan mampu meningkatkan angka melek huruf penduduk. Rasio guru dan murid semakin tahun semakin baik. Dari 14,02 tahun 2008 menjadi 14,4 tahun 2009, dan menjadi 14,73 tahun 2010.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan kesehatan. Jumlah tenaga medis 200 orang tahun 2010, bidan dan perawat sejumlah 1.230, sanitarian 23 orang, ahli gizi 33 orang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kepada masyarakat miskin. Pada tahun 2010 cakupan kunjungan puskesmas mencapai 187,5 persen, kunjungan puskesmas pembantu mencapai 48,38 persen, dengan kunjungan bayi sebesar 67 persen dan rujukan pelayanan masyarakat miskin sebesar 15,39 persen. Pada Rumah sakit, dukungan infrastruktur dan SDM telah meningkatkan *Bed*

*Occupancy Rate (BOR)* dari 42,6 persen tahun 2006 menjadi 50,52 tahun 2008, dan meningkat secara signifikan tahun 2010 sebesar 67,03 persen.

Berdasarkan hasil catatan Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2006 hingga 2010 tidak ada peningkatan panjang jalan kabupaten, yaitu sejumlah 2.718,80. Demikian pula panjang jalan nasional sejumlah 130,08 km, dan panjang jalan provinsi sejumlah 114,26 km. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kondisi jalan nasional, pada tahun 2008 panjang jalan yang telah dihotmix hanya sejumlah 100,53 km menjadi 118,08 km pada tahun 2010. Dari 118,08 km jalan nasional, sejumlah 90,2 dalam kondisi baik, 20,5 km dalam kondisi sedang, dan 7,5 km rusak berat.

Demikian pula pada kondisi jalan provinsi, pada tahun 2006 jalan dalam kondisi baik sejumlah 102,26 km, meningkat pada tahun 2008 sejumlah 108,26 km, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sejumlah 110,26 km. Sedangkan kondisi jalan kabupaten, pada tahun 2006 panjang jalan yang telah dihotmix hanya sejumlah 336,4 km menjadi 625,68 km pada tahun 2008, dan meningkat menjadi 956,6 km pada tahun 2010. Dari 2.718,8 km jalan kabupaten, sejumlah 1.703,8 dalam kondisi baik, 200,3 km dalam kondisi rusak sedang dan 190,8 km dalam keadaan rusak berat.

Kondisi kerusakan jalan juga tergantung dari adanya trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air. Pada tahun 2006 jalan yang trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air sejumlah 19.100 meningkat pada tahun 2007 menjadi 19.700 dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 21.400. dari jumlah tersebut drainase dalam kondisi baik sejumlah 45 persen tahun 2006, meningkat menjadi 55 persen tahun 2008 dan menjadi 60 persen tahun 2010.

Pada sisi lain pengembangan jalan penghubung utama di bagian Selatan atau dikenal Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai program regional telah direspon Kabupaten Banyuwangi. Jalan yang diarahkan untuk menghubungkan mulai dari Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Malang – Lumajang – Jember – Banyuwangi dengan panjang ruas 618,80 km. Di Kabupaten Banyuwangi, Jalan Lintas Selatan akan menghubungkan Tengkinol - Malangsari – Kendenglembu – Glenmore – Gentengkulon – Rogojampi – Banyuwangi – Ketapang, dengan panjang 110 Km.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi) merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jaringan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil. Jaringan irigasi menjadi infrastruktur utama dalam peningkatan pembangunan pertanian. Luas irigasi Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi baik pada tahun 2006 sebesar 95 persen, meningkat pada tahun 2007 sebesar 98 persen dan pada tahun 2009 mencapai 99 persen.

Dukungan infrastruktur pertanian serta upaya intensifikasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang memadai. Produktifitas pertanian meningkat dari 5,89 ton per hektar tahun 2006 menjadi 6,03 ton per hektar tahun 2008,

dan menjadi 6,35 ton per hektar tahun 2010. Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2006 sebesar 25,03 persen mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 25,75 persen dan tahun 2010 menjadi 25,95 persen.

Di sektor perikanan, dapat dilihat adanya produksi perikanan pada tahun 2010 sebesar 57,8 ribu ton, meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar 44,84 ribu ton. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Pada tahun 2006 sebesar 66,7 ribu ton, tahun 2008 sebesar 66,74 ton, dan tahun 2008 sebesar 66,53 ribu ton.

Tumbuhnya perekonomian Kabupaten Banyuwangi memberikan implikasi positif terhadap industri pariwisata yang saat ini telah berkembang. Kunjungan wisatawan manca, dan wisatawan lokal meningkat dari tahun 2006 hingga 2010. Kunjungan wisatawan manca tahun 2006 sebesar 5.608 orang meningkat menjadi 10.337 orang pada tahun 2008, dan menjadi 16.890 orang tahun 2010. Wisatawan domestik pada tahun 2006 sebesar 349.610 mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 383.567 dan tahun 2010 menjadi 25,95 persen.

Peningkatan infrastruktur pariwisata menjadi salah satu fokus dalam lima tahun terakhir. Seiring dengan pengembangan kawasan segitiga berlian wisata yaitu Ijen, Sukamade dan Plengkung, maka infrastruktur menuju destinasi wisata tersebut menjadi salah satu prioritas penanganan. Pemeliharaan jalur transportasi menuju Ijen dilaksanakan dalam rangka pengembangan wisata dan pengembangan wilayah Kecamatan Licin dan Glagah.

Pada urusan perumahan, rumah tangga yang telah menggunakan saluran listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2006 rumah tangga yang telah menggunakan saluran listrik sejumlah 276.151 meningkat pada tahun 2007 menjadi 281.674, menjadi 298.827 tahun 2009 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 307.792 rumah tangga. Dari aspek sanitasi perumahan juga telah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006 rumah tangga bersanitasi sejumlah 336.720 meningkat pada tahun 2008 menjadi 423.121, menjadi 435.815 tahun 2009 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 448.890 rumah tangga.

Pada urusan penataan ruang, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2006 rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB sejumlah 37 persen mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 40 persen. Demikian pula bangunan yang telah berIMB juga mengalami peningkatan, tahun 2008 sejumlah 1.665 meningkat pada tahun 2010 menjadi sejumlah 2.295.

Pada sektor transportasi, jumlah arus penumpang angkutan meningkat signifikan dari tahun 2006 ke tahun 2010. Pada tahun 2006 sejumlah 1,53 juta orang, meningkat menjadi 1,56 juta orang tahun 2007, dan mengalami peningkatan tahun 2010 menjadi 1,599 juta orang. Besarnya arus penumpang ini didukung oleh 8 pelabuhan laut, darat, dan udara. Pelabuhan Ketapang merupakan pintu masuk utama yang menghubungkan Jawa – Bali. Di sisi udara, beroperasinya Bandara Blimbingsari diharapkan akan membuka lebih luas perdagangan, investasi, dan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Aspek lingkungan hidup sangat terkait dengan perkembangan pembangunan daerah, eksplorasi sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk telah menyebabkan meningkatnya beban lingkungan. Rata-rata sampah meningkat dari 912,5 kg per



hari pada tahun 2005 menjadi 2920 kg per hari pada tahun 2008. Demikian pula beban pencemaran limbah industri, mengalami peningkatan. Untuk itu upaya meminimalisir dampak yang terjadi juga telah ditingkatkan. Pemeriksaan sampel air limbah industri dan badan air ditingkatkan dari 44 sampel tahun 2005 menjadi 48 sampel tahun 2008. Untuk mengurangi pencemaran, pengadaan bibit penghijauan juga terus dilaksanakan tiap tahunnya dengan rata-rata 3000 bibit per tahun untuk menstimulasi kesadaran masyarakat.

Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam tetap diarahkan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian alam dan stabilitas ekosistem. Eksplorasi tambang emas telah dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga (IMN). Eksplorasi diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap menjaga stabilitas ekosistem dan lingkungan.

Stabilitas ekosistem dapat dicerminkan oleh perkembangan sumber mata air dalam kondisi baik dengan debit yang stabil. Pada tahun 2006 hanya sebesar 60 persen, tahun 2008 kondisinya meningkat menjadi 75 persen, dan tahun 2010 sebesar 80 persen. Penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tahun 2006 sebesar 40 persen, meningkat tahun 2008 menjadi 55,55 dan pada tahun 2010 menjadi 68 persen.

Pada urusan kependudukan, dapat dilihat dari kepemilikan KTP. Pada tahun 2006 penduduk yang memiliki KTP hanya 34,36 persen, meningkat tahun 2008 menjadi 51,78, meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 60,5 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi sebesar 70,15 persen. Namun demikian, pada pelayanan akte kelahiran masih relatif rendah dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2006, akte kelahiran per 1000 penduduk hanya sebesar 2,09 persen, meningkat pada tahun 2008 sebesar 3 persen, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,5 persen.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2006-2010, Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 14,95 tahun 2006-2010, sedangkan Partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 85,05 tahun 2006-2010.

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari keaktifan posyandu, PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Dari 217 LPM terdapat 20 LPM berprestasi. Demikian pula keswadayaan masyarakat juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sebesar 60 persen, meningkat pada tahun 2010 menjadi 65 persen.

Dalam hal pelayanan umum terkait dengan birokrasi sebagai unit pemerintah, berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut

terkait dengan semakin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain; transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum, meningkatnya tuntutan dalam penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum, rendahnya kesejahteraan PNS, dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan sendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat, makin deras arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing dengan melakukan aliansi strategis untuk menjaga keutuhan bangsa.

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, jumlah PNS mencapai 13.890 orang meningkat dari tahun 2007 sebesar 13.624 orang. Jumlah PNS tahun 2008 terdistribusi dalam golongan III sebesar 5.988 orang, golongan IV sebesar 4.930 orang, golongan II sebesar 2.705 orang dan sisanya 267 golongan I.

#### **D. Aspek Daya Saing Daerah**

Kabupaten Banyuwangi memiliki karakteristik wilayah, yang dalam taraf tertentu, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Karakteristik seperti ini pada akhirnya bisa menjadi daya saing penting bagi Kabupaten Banyuwangi.

Wilayah Kabupaten Banyuwangi membentang dari dataran rendah hingga pegunungan, dari kawasan nelayan di sepanjang garis pantai hingga kawasan pertanian dan perkebunan yang terhampar dari wilayah utara, selatan hingga wilayah barat. Di bagian Selatan, terdapat kawasan konservasi cagar alam Meru

Betiri dan Pantai Sukamade, yang merupakan kawasan pengembangan penyu. Di bagian timur terdapat Taman Nasional Alas Purwo dan di bagian utara terdapat dataran kawah gunung Ijen. Di bagian timur, terdapat salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia yaitu Pelabuhan Ikan Muncar. Tidak hanya keberagaman kondisi fisik, keberagaman budaya, etnis dan bahasa juga dijumpai di Kabupaten Banyuwangi, dari suku Using, Jawa, Bali, Madura hingga beberapa etnis lainnya.

Di samping itu, kekhasan budaya masyarakat Banyuwangi sebagai potensi wisata yang senantiasa dijaga kelestariannya serta didorong pengembangannya terutama pada 7 (tujuh) unsur, yaitu bahasa using, kesenian tradisional, keragaman sistem religi, organisasi tradisional, sistem pengetahuan, sistem peralatan dan teknologi, dan sistem mata pencaharian. Ketujuh unsur khas Banyuwangi ini senantiasa digali dan dikembangkan untuk memberikan keseimbangan dalam hubungan timbal balik yang dinamis antara manusia dengan alam.

Hingga tahun 2008, terdapat 23 obyek wisata yang menonjol, dan 2 diantaranya adalah wisata budaya. Dalam catatan 49 hotel di Kabupaten Banyuwangi terdapat 330.476 wisatawan domestik, dan 19.416 wisatawan mancanegara dengan tingkat hunian hotel rata-rata 22 orang per hari.

Potensi alam dan potensi budaya semacam itu merupakan modal yang cukup besar bagi Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan sektor pariwisata guna mendongkrak perekonomian. Ketika potensi ini dikaitkan dengan potensi lain, seperti sektor perekonomian dan industri olahan rakyat, termasuk kerajinan, serta adanya pengembangan infrastruktur, akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi basis pengembangan sektor pariwisata dari Provinsi Bali, misalnya.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Banyuwangi masih sangat besar. Rata-rata masih sekitar 50% setiap tahunnya. Hal ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hanya saja, potensi semacam itu belum dimanfaatkan secara baik karena produk-produk pertanian masih belum terkait secara baik dengan produk-produk olahan. Manakala produk-produk pertanian itu diolah, akan memiliki nilai tambah tersendiri dan akan menjadi sumber daya saing bagi Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2005 seluas 37.958,35 ha. Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 sebesar 1.580.642 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 316.128 KK. Artinya rata-rata 1 (satu) KK membutuhkan lahan permukiman seluas 0,12 ha atau 1.200 m<sup>2</sup>. Dengan asumsi tersebut luas kawasan permukiman yang dibutuhkan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 seluas 43.982,23 ha.

Secara umum kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi:

1. Kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang (*developer*)
2. Kawasan permukiman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Kawasan ini umumnya berupa kampung, serta permukiman formal yang cenderung memiliki kapling lebih luas serta kawasan permukiman pedesaan
3. Kawasan permukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai akibat adanya perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur, di antaranya:

- a. Kawasan permukiman yang timbul karena pertumbuhan dan perkembangan kota, seperti Kota Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi
- b. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan jalan tol yang melintasi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi
- c. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan kawasan industri di Bangsring Wongsorejo
- d. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan bandar udara Blimbingsari dan *Fishery Park* Bomo di Kecamatan Rogojampi
- e. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan jalur lintas selatan yang melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore dan Kalibaru
- f. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan lahan peruntukan industri di Kecamatan Muncar.

Kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi tersebar di dua kawasan yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.

#### A. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan secara umum dicirikan oleh wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Agar hubungan desa dan kota tetap dinamis maka penataan struktur kawasan perdesaan dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa-desanya pusat pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat ibukota kecamatan, sedangkan ibukota kecamatan menginduk pada pusat sub satuan wilayah pembangunan (SSWP), sedangkan pusat SSWP akan menginduk ke Pusat Wilayah Pengembangan. Selain desa pusat pertumbuhan, untuk tetap menjaga keterkaitan antara kota dan desa (*urban-rural linkages*) yang bersifat interpendensi timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya. Keterkaitan tersebut merupakan salah satu ciri dari agropolitan. Pola penataan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.

#### B. Kawasan Perkotaan

Untuk mempermudah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu :

- 1) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Utara.
- 2) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Timur.
- 3) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Barat.

#### 4) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Selatan.

Dari empat wilayah pengembangan tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat wilayah pengembangan yang akan menjadi pusat orientasi dari wilayah-wilayah yang ada di belakangnya. Pusat-pusat pengembangan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisa orde kota. Pusat kota yang dimaksud adalah :

1. Banyuwangi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan (WP) Banyuwangi Utara.
2. Rogojampi ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Timur.
3. Genteng ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Barat.
4. Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Selatan.

Penyusunan Kembali (*Review*) RTRW Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2029 yang sedang dalam proses penyelesaian diharapkan dapat menjadi rujukan pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi termasuk penataan perumahan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2029, sudah dalam tahap pengajuan untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Timur. Secara umum kebijakan RTRW Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2029 sebagai berikut :

### **1. Kebijakan Dan Strategi Sistem Perdesaan**

#### **A. Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan**

Kebijakan pengembangan system pusat permukiman perdesaan dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang wilayah meliputi:

1. Pembentukan pusat pelayanan di kawasan perdesaan secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup dan Sumberdaya Manusia di kawasan perdesaan.
2. Peningkatan akses pelayanan sarana dan prasarana lingkungan di pusat permukiman kawasan perdesaan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan Sumberdaya Manusia di kawasan perdesaan.
3. Peningkatan keterkaitan antar kawasan perdesaan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan melalui pengembangan akses jalan-jalan desa dan peningkatan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan khususnya yang berbasis pada sektor-sektor unggulan wilayah.

#### **B. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan**

Strategi pengembangan sistem pedesaan meliputi:

##### **Strategi pengembangan pembentukan pusat pelayanan di kawasan perdesaan secara mandiri meliputi :**

1. Mengembangkan spesialisasi komoditas unggulan perdesaan,
2. Membentuk pusat koleksi dan distriusi hasil pertanian berdasarkan atas komoditi unggulan masing-masing wilayah unggulan.

3. Membentuk pusat pengembangan agribis.

**Strategi pengembangan untuk peningkatan akses pelayanan sarana dan prasarana lingkungan di pusat permukiman kawasan perdesaan meliputi :**

1. Mengembangkan prasarana dasar perdesaan yang meliputi transportasi, air bersih, listrik, dan sanitasi.
2. Mengembangkan sarana dasar perdesaan yang meliputi sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
3. Mempercepat pembangunan pada desa miskin.

**Strategi pengembangan untuk peningkatan keterkaitan antar kawasan perdesaan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, meliputi:**

1. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani (farm road).
2. Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan distribusi kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan.
3. Peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar sentra produksi dan pusat distribusi.

**Strategi pengembangan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan khususnya yang berbasis pada sektor-sektor unggulan wilayah meliputi :**

1. Ekstensifikasi pertanian.
2. Intensifikasi pertanian.
3. Pengembangan kawasan agropolitan.
4. Pengembangan keterkaitan komoditas pertanian dengan sektor industri dan pariwisata.

## **2. Kebijakan Dan Strategi Sistem Perkotaan**

### **A. Kebijakan Pengembangan Sistem Perkotaan**

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan dalam mendukung tujuan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Pengarahan struktur permukiman pusat perkotaan secara berhirarki.
2. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan agar tidak cenderung memusat di kawasan perkotaan Banyuwangi, Ketapang, dan Ronggojampi.

### **B. Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan Perkotaan**

**Strategi pengembangan untuk pengarah struktur permukiman pusat Perkotaan secara berhirarki dilakukan melalui:**

1. Meningkatkan peran perkotaan Banyuwangi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan peningkatan peran ibu kota kecamatan/pusat-pusat pelayanan untuk menunjang kegiatan skala Lokal.

- a) PKW  
 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan satu atau beberapa kabupaten. Wilayah yang akan dikembangkan sebagai PKW adalah **Kawasan Perkotaan Banyuwangi**.
- b) PKL  
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang menjadi pusat regional skala kabupaten dan menjadi kutub pertumbuhan utama pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Wilayah yang dikembangkan sebagai PKL adalah: **kawasan perkotaan Genteng, Gambiran, Rogojampi, dan Muncar**.
- c) PKLp  
 Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang nantinya akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan. Wilayah yang dikembangkan sebagai PKLp adalah: **Kalipuro, Wongsorejo, dan Bangorejo**
- d) PPK  
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Wilayah yang dikembangkan sebagai **PPK Kalibaru, Singojuruh, Srono, Pesanggaran, Purwoharjo, Tegaldlimo, Cluring, Glenmore, Kabat, Sempu, Songgon, Glagah, Wongsorejo, Giri, Tegalsari, Licin, dan Siliragung**.

2. Mengembangkan Cluster Wilayah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan potensi dan arahan pengembangan, yaitu :

- a) **Cluster Banyuwangi Utara** yang meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Licin, dan Glagah. Pusat pelayanan dan pertumbuhan di cluster ini adalah Kota Banyuwangi.

Fungsi Kegiatan :

- Pertanian Tanaman Pangan
- Perkebunan
- Perikanan
- Peternakan
- Industri
- Pelabuhan
- Kawasan Lindung
- Pariwisata

- b) **Cluster Banyuwangi Tengah Timur** yang meliputi Kecamatan Songgon, Kabat, Singojuruh, Srono, Muncar, dan Cluring, dengan Kecamatan Rogojampi sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan.

Fungsi Kegiatan :

- Pertanian tanaman pangan
- Perikanan
- Peternakan
- Perkebunan
- Industri
- Pendidikan

- Kawasan Lindung
  - Bandar Udara
- c) **Cluster Banyuwangi Tengah Barat** yang meliputi Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Tegalsari, dan Gambiran dengan Kecamatan Genteng sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan.
- Fungsi Kegiatan :
- Pertanian tanaman pangan
  - Peternakan
  - Perkebunan
  - Pariwisata
  - Industri Kecil
  - Kawasan Lindung
- d) **Cluster Banyuwangi Selatan** yang meliputi Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, dan Tegaldlimo, dengan Kecamatan Bangorejo sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan.
- Fungsi Kegiatan :
- Pertanian tanaman pangan
  - Perikanan
  - Perkebunan
  - Pariwisata
  - Industri Kecil
  - Kawasan Lindung
3. Mendorong pertumbuhan wilayah ke arah Selatan dan Barat Kabupaten Banyuwangi.

**Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan agar tidak cenderung memusat di kawasan perkotaan Banyuwangi, Ketapang, dan Ronggojampi, meliputi:**

1. Mengembangkan dan mempromosikan kawasan perkotaan kecamatan khususnya di wilayah bagian selatan menjadi PKLp.
2. Mengembangkan kegiatan agropolitan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian (perkebunan dan perikanan) di wilayah bagian selatan dan barat.

Di samping itu, aspek lingkungan hidup sangat terkait dengan perkembangan pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk telah menyebabkan meningkatnya beban lingkungan. Rata-rata sampah meningkat dari 912,5 kg per hari pada tahun 2005 menjadi 2920 kg per hari pada tahun 2008. Demikian pula beban pencemaran limbah industri, mengalami peningkatan. Untuk itu upaya meminimalisir dampak yang terjadi juga telah ditingkatkan. Pemeriksaan sampel air limbah industri dan badan air ditingkatkan dari 44 sampel tahun 2005 menjadi 48 sampel tahun 2008. Untuk mengurangi pencemaran, pengadaan bibit penghijauan juga terus dilaksanakan tiap tahunnya dengan rata-rata 3000 bibit per tahun untuk menstimulasi kesadaran masyarakat.



Selain itu, jumlah penduduk Banyuwangi yang cukup besar berpotensi memperkuat daya saing daerah, ketika penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang memadai.

### **Mitigasi Bencana:**

Di wilayah Jawa Timur wilayah rawan gempa utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, yakni :

- Resiko besar tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
- Resiko sedang tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan tsunami , ditetapkan daerah bahaya 1 dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan tsunami (daerah bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir. Zona-zona ini terdiri sebagai berikut:

- a. Zona perikanan tangkap
- b. Zona mangrove
- c. Zona perikanan darat/tambak
- d. Zona perkebunan
- e. Zona permukiman/wisata bahari. Berada minimal 3500 meter dari garis pasang tertinggi.

Penataan ruang kawasan untuk masing-masing zona fungsi dan penataannya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pola Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam: Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- b. Pengelolaan kawasan lindung diprioritaskan yakni : sempadan pantai, muara, mangrove, terumbu karang, dan kawasan yang sensitif atau rentan terhadap perubahan alam serta mempertahankan bentukan alami sebagai pelindung alam pada kawasan permukiman di sekitar pantai dari bahaya bencana. Contoh Gumuk-gumuk pasir (sand dunes).
- c. Strategi mitigasi bencana tsunami dijabarkan sebagai berikut :
  1. Mitigasi bencana tsunami melalui penataan ruang  
Manajemen resiko tsunami (tsunami risk management) melalui penataan ruang dapat dilakukan dengan :
    - a. Pencegahan pembangunan fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran) pada zona rawan bencana tsunami;
    - b. Mengidentifikasi daerah-daerah aman dan rute evakuasi dengan meng-overlay-kan peta-peta bahaya tsunami dan jaringan jalan;
    - c. Penyediaan fasilitas penyelamatan, secara vertikal maupun horizontal, sesuai kondisi geografis. Untuk itu dapat digunakan bangunan atau bukit penyelamatan disertai rute-rute penyelamatan;

- d. Menyediakan zona penyangga (buffer zone) untuk mengurangi energi tsunami sehingga daya rusaknya menurun;
  - e. Wilayah yang kemungkinan/potensi tergenang air diperuntukkan bagi taman atau area olahraga; serta
  - f. Pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan bencana antara lain pembatasan eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan.
2. Mitigasi bencana tsunami melalui rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan :
- a. Melengkapi dengan sistem peringatan dini (early warning system/EWS);
  - b. Memperkuat bangunan agar tahan terhadap tekanan gelombang dan arus kuat, antara lain dengan merekonstruksi pondasi struktur agar dapat menahan erosi dan penggerusan oleh arus, membuat lantai dasar menjadi terbuka sehingga mampu membiarkan air laut melintas, menempatkan generator cadangan dilantai yang tidak kena banjir;
  - c. Memodifikasi sistem transportasi untuk dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat; serta
  - d. Menggunakan struktur penahan gelombang laut, antara lain seperti sea wall, sea dikes, breakwaters, river gates untuk menahan atau mengurangi tekanan tsunami.
3. Pengembangan kawasan budidaya di daerah rawan bencana tsunami.
- a. Relokasi : Apabila dampak ekonomi dan lingkungan sangat besar maka kawasan budidaya berada jauh dari garis pantai. Bila kondisi ekstrim, perlu menghindari sama sekali kawasan yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
  - b. Akomodasi : Bersifat penyesuaian terhadap perubahan alam atau resiko dampak seperti reklamasi, peninggian bangunan atau perubahan pola agriculture.
  - c. Proteksi : Melalui hard structure seperti pembangunan penahan gelombang (breakwater) atau tanggul banjir (seawalls) dan yang bersifat soft structure seperti revegetasi mangrove atau penimbunan pasir (beach nourishment).

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokratis.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Apabila selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dinamika eksternal dapat diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

#### **A. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

##### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Kedua isu tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kurangnya pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Masalah kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi memang mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Tetapi, jumlah penduduk dalam kategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Pada Tahun 2005, penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi mencapai 157.347 KK. Rinciannya adalah, penduduk hampir miskin mencapai 64.649 KK, penduduk miskin 65.451 KK dan penduduk sangat miskin 27.247 KK. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2008, penduduk miskin mencapai 129.324 KK, yang terdiri penduduk hampir miskin mencapai 56.714 KK, penduduk miskin 48.163 KK dan penduduk sangat miskin 24.447 KK. Selain itu, tingkat pengangguran di Kabupaten Banyuwangi juga tergolong tinggi. Pada Tahun 2009, penduduk dengan kategori menganggur mencapai 53.274 orang. Apabila dilihat dari jumlah angka pengangguran terbuka terdapat penurunan prosentase. Pada Tahun 2003, pengangguran terbuka di Banyuwangi adalah 6,84%. Pada waktu yang sama rata-rata pengangguran terbuka di Jawa Timur adalah 4,82%. Namun, pada Tahun 2009, angka pengangguran terbuka di Banyuwangi mengalami penurunan menjadi 4,1%. Sedangkan di Jawa Timur naik menjadi 5,1%.

Dalam situasi semacam itu, di antara tantangan besar bagi Kabupaten Banyuwangi di dalam meningkatkan kemakmuran rakyat adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara terus menerus (pro poor).

## **2. Kependudukan dan Sosial Budaya**

Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kabupaten Banyuwangi akan mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup pesat. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan statistik tahun 2005 berjumlah 1.539.981 jiwa. Jika dikaitkan dengan luas wilayah daratan, maka kepadatan penduduk rata-rata 251 jiwa per km<sup>2</sup> dan penyebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk yang paling dominan adalah di sektor pertanian mencapai 75,32 persen. Penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 sejumlah 1.587.403 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,22 persen dan tingkat kepadatan 275 jiwa/km<sup>2</sup>. Meskipun penduduk Kabupaten Banyuwangi belum tergolong padat, namun pertumbuhannya harus dikendalikan agar terpelihara keseimbangannya dengan daya dukung wilayah. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sejumlah 1.554.997 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 0,44 % dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 269 jiwa/km<sup>2</sup>.

Besarnya jumlah penduduk pada tahun 2005-2010 tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan, meningkatnya kemampuan membaca dan menulis, menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menurunnya tindak kekerasan, berkurangnya eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian, pengendalian terhadap kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk tetap perlu diperhatikan untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan SDM agar memiliki daya saing dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kualitas SDM yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian daerah. Peringkat IPM Kabupaten Banyuwangi pada kurun waktu 2005-2010 masih berada di peringkat 26 menunjukkan IPM Kabupaten Banyuwangi yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, peningkatan pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM.

Di bidang kependudukan, tantangan yang dihadapi adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran, mengendalikan mobilitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan untuk menciptakan komposisi penduduk tumbuh yang seimbang dan merata agar jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu ditargetkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian, sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antar wilayah dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah permasalahan tenaga kerja yang merupakan faktor penggerak roda pembangunan, khususnya di bidang perekonomian. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Dengan demikian diperlukan strategi dan kebijakan pemerintahan yang dapat membuka lapangan kerja secara luas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain itu, tantangan ke depan adalah arus globalisasi yang semakin kuat yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, tantangan bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk dapat mempertahankan jati diri kedaerahan dan kebangsaan mereka, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan kehidupan yang toleran dan akomodatif terhadap keragaman budaya, serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai lokal, nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal guna mengoptimalkan jati diri.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama pada masa yang akan datang adalah bagaimana mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, menghilangkan perilaku penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari berbagai perilaku menyimpang dan tindak kekerasan. Dengan demikian tantangan utama yang akan muncul adalah politisasi agama (dengan isu-isu antara lain: terorisme, liberalisme dan gerakan sempalan keagamaan), serta fanatisme ekstrim agama (seperti klaim primordialisme agama, ideologisasi agama dan lain-lain).

Dalam bidang sosial budaya, tantangan ke depan yang dapat dijadikan peluang adalah keragaman budaya dan adat istiadat di Kabupaten Banyuwangi. Upacara adat yang berkembang antara lain bersih desa, ider bumi, petik laut, kebo-keboan, tolak balak, selamatan kuburan, baritan, cok bakalan, mantu

kucing dan lain-lain. Selain itu upacara dalam hubungannya dengan kekerabatan antara lain tingkeban, cuplak puser, mudhun lemah, ngruwat dan ngebangi.

Secara garis besar komunitas adat di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari tiga komunitas yaitu Masyarakat Adat Pesisiran, Masyarakat Adat Pedalaman dan Masyarakat Adat Agraris. Masyarakat Adat Pesisiran terdiri dari (a) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Rajeg Wesi Pesanggaran; (b) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Pancer Pesanggaran; (c) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Lampon Pesanggaran; (d) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Grajagan Purwoharjo; (e) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Plengkung Alas Purwo Tegaldlimo; (f) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Muncar; (g) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Blimbingsari Rogojampi; (h) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Pondoknongko Kabat; (i) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Pakem Kel. Karangrejo Banyuwangi; dan (j) Komunitas Masyarakat Adat di Pantai Sumberkencono Wongsorejo.

Sedangkan Masyarakat Adat Pedalaman terdiri dari (a) Komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Genteng Padepokan Gumuk Sari Murni, Dusun Temurejo Desa Kembiritan; (b) Komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Sempu Padepokan Mbah Joyo Purnomo, Tojo; (c) Komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Songgon Keluarga Besar Mbah Abdul Hanif Sholehuddin; (d) Komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Tegalsari Padepokan Suraputih Eyang Mangun; (e) Komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Tegalsari Padepokan Mbah Sudarji; (f) Komunitas Masyarakat Adat Kecamatan Bangorejo; dan (g) Komunitas Masyarakat Adat Kecamatan Pesanggaran.

Selanjutnya, Masyarakat Adat Agraris terdiri dari (a) Komunitas Masyarakat Adat Kebo-keboan Alas Malang; (b) Komunitas Masyarakat Adat Keboan Desa Aliyan; (c) Komunitas Masyarakat Adat Desa Macan Putih Kabat; (d) Komunitas Masyarakat Adat Seblang Desa Bakungan; (e) Komunitas Masyarakat Adat Seblang Desa Ulihsari; (f) Komunitas Masyarakat Adat Desa Kemiren; (g) Komunitas Masyarakat Adat Desa Glondong Rogojampi; (h) Komunitas Masyarakat Adat Desa Wiyayu Songgon; (i) Komunitas Masyarakat Adat Desa Tegaldlimo; (j) Komunitas Masyarakat Adat Desa Dadapan Kecamatan Kabat; (k) Komunitas Masyarakat Adat Ketapang; (l) Komunitas Masyarakat Adat Sugihwaras Glenmore; dan (m) Komunitas Masyarakat Adat Tembokrejo.

Di bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi antara lain penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penurunan penduduk yang buta aksara; menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya dan miskin, desa dan perkotaan, serta antara jenis kelamin. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pendidikan dapat mendorong dan berperan dalam pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral.

Tantangan selanjutnya dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan kualitas dan relevansi, termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, serta antara penduduk kaya dan miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan

pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan peningkatan jumlah penduduk.

Dalam bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, ada kecenderungan meningkatnya kasus-kasus penyakit non infeksi *cardiovascular* dan penyakit *degenerative* serta berkembangnya penyakit "*new emerging disease*". Sedangkan penyakit-penyakit infeksi belum menurun, demikian juga dalam upaya jaminan penyediaan makanan yang sehat.

Selanjutnya, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga. Semetara itu tantangan yang dihadapi dalam bidang seni dan budaya adalah meningkatkan pemahaman, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai seni dan budaya sebagai jati diri.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan; mengurangi tindak kekerasan; eksploitasi; meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan diskriminasi serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tantangan lainnya yang dihadapi dalam bidang kesejahteraan sosial adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan bantuan sosial, meningkatkan antisipasi terhadap berbagai krisis sosial dan bencana alam, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat serta meningkatkan cakupan jaminan sosial masyarakat.

### **3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Derasnya arus globalisasi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek. Penguasaan terhadap Iptek diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai hal. Tantangan ke depan diantaranya adalah meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sumberdaya Iptek, baik SDM, sarana prasarana maupun pembiayaan, serta pengembangan budaya Iptek di tengah masyarakat.

### **4. Perekonomian**

Dalam dua puluh tahun ke depan, persaingan investasi dan persaingan antar daerah akan semakin tinggi, oleh karena itu masing-masing daerah berupaya menambah lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui masuknya investasi, sehingga persaingan dalam peluang investasi antar daerah sangat ketat. Sehubungan dengan itu, setiap daerah berupaya secara maksimal untuk melakukan promosi potensi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi. Dengan dibangunnya berbagai infrastruktur wilayah termasuk prasarana jalan dan transportasi baik darat, laut, maupun udara, maka akan menambah peluang investasi di Kabupaten Banyuwangi pada masa yang akan datang.

Selain itu, perekonomian daerah dihadapkan pada perekonomian global dan liberalisasi perdagangan dunia, antara lain diberlakukannya kawasan

perdagangan bebas *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010 dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang menjadi dasar pelaksanaan WTO (*World Trade Organization*).

Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi didorong oleh sektor pertanian dalam arti luas. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Banyuwangi. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB menjadi 49 persen. Secara riil perekonomian Kabupaten Banyuwangi banyak digerakkan oleh tiga sektor utama yaitu pertanian, perdagangan hotel dan restoran, serta industri pengolahan. Besarnya kontribusi sektor pertanian dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, seperti turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, serta perubahan iklim yang tidak menentu. Sedangkan para nelayan menghadapi masalah dengan penurunan hasil tangkapan ikan. Di pihak lain, para petani dan nelayan tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi agar memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang mereka hasilkan hanya dijual sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian belum dimanfaatkan menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Tantangan terbesar bagi Kabupaten Banyuwangi adalah melakukan revitalisasi sektor pertanian. Melalui revitalisasi ini, produksi sektor pertanian akan meningkat, sehingga sumbangan pada PDRB juga akan meningkat. Selain itu, revitalisasi juga terkait dengan upaya mengkaitkan (*linkage*) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani dan nelayan juga akan mengalami peningkatan.

Dari berbagai tantangan dan peluang yang akan dihadapi, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai:

- a. **Transformasi struktural dalam perekonomian.** Arah transformasi struktur perekonomian berkembang ke arah terbentuknya struktur perekonomian yang lebih seimbang. Hal ini mempertegas bahwa pembangunan pertanian memberikan kesempatan agar tumbuh, agar sektor industri dan jasa dapat berkembang, sehingga dapat terbangun struktur perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa. Namun dalam faktanya, transformasi struktural tersebut belum disertai dengan transformasi struktural ketenagakerjaan. Sehingga tantangan yang dihadapi ke depan adalah memadukan transformasi struktural perekonomian yang seimbang dengan transformasi struktural ketenagakerjaan;
- b. **Pemilikan lahan yang semakin sempit.** Tantangan dalam memberdayakan para petani berlahan sempit sebagai pelaku agribisnis melalui pengembangan dan penciptaan sistem kelembagaan yang mampu menjamin petani agar dapat memenuhi skala usaha yang efisien dan menghasilkan komoditas andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.



- c. **Pemasaran dan mutu produk.** Sampai saat ini, kendala utama yang berkaitan dengan pemasaran antara lain persoalan transparansi harga, distribusi dan pemasaran yang belum efisien. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus dicari solusinya. Selain itu pengembangan mutu produk merupakan tantangan yang harus dilakukan secara *by process* dimulai dari tingkat budidaya, pengolahan hingga pemasarannya, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor.
- d. **Kelembagaan dan kemitraan.** Lemahnya posisi tawar produsen disebabkan oleh belum seimbanginya kemampuan antar pelaku. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pengusaha-pengusaha di perdesaan dan mengembangkan usaha dengan pola-pola kemitraan.
- e. **Permodalan dan investasi.** Tantangan ke depan adalah bagaimana merumuskan kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat merangsang investor untuk berinvestasi berbasis perdesaan, serta mengembangkan skim kredit yang disesuaikan dengan karakteristik dari jenis usaha yang dikembangkan oleh pelaku bisnis di perdesaan.

## 5. Sarana dan Prasarana

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Tantangan pembangunan infrastruktur antara lain infrastruktur angkutan jalan, perumahan, sumberdaya air (termasuk air bersih), prasarana jalan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi terpadu antar moda dan intra moda Kabupaten Banyuwangi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang meliputi transportasi darat-laut-udara. Infrastruktur strategis antara lain Bandara Blimbingsari, Pelabuhan (penyeberangan dan pelabuhan laut), dan jalan lintas selatan dengan segala potensinya merupakan tantangan kedepan untuk terus dikembangkan dengan dukungan jaringan perkeretaapian. Oleh karena itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antar moda dan intra moda yang selaras dengan pengembangan wilayah serta mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya. Selain itu tantangan lainnya adalah belum terwujudnya kerjasama antar daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pengadaan dan pengelolaan prasarana transportasi seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara. Begitu pula dengan kondisi lambannya rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi sungai, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana satu satunya sarana transportasi adalah lewat air. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

Tantangan pemenuhan kebutuhan penyediaan sumber daya air sangat besar. Sarana pengairan sampai saat ini terasa masih kurang di berbagai wilayah. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Belum dibuatnya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan hukuman bagi masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap sumberdaya air yang digunakan bagi kepentingan publik, belum seimbangny upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air bagi kesejahteraan seluruh rakyat, belum terlaksananya peraturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu, serta belum seimbangny fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin kebutuhan pokok setiap individu.

Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan pembangkit tenaga listrik, tidak ekonomisnya penggunaan PLTD, sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang kurang efektif, kurang efisiennya pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir, serta proses dan penyalurannya. Belum tereksplorasinya sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti tenaga air, angin, matahari dan tenaga uap. Tidak mudah menerapkan pola pemakaian energi listrik untuk melakukan hemat energi. Masih sangat tingginya kerugian baik kerugian teknis maupun non-teknis.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan/permukiman yaitu belum adanya perencanaan yang terpadu dan harmonis dengan tata ruang daerah dalam penempatan daerah permukiman yang baru, kurangnya ketersediaan lahan bagi permukiman, serta kurangnya studi dan perencanaan yang komprehensif mengenai permukiman yang terletak di bantaran sungai.

Selanjutnya, tantangan utama dalam penyediaan energi adalah memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap minyak, serta mengembangkan dan meningkatkan kontribusi berbagai energi alternatif seperti biomass, bio energi, biogas, arus laut, energi nabati dan lain sebagainya.

## **6. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang**

Tantangan pengembangan wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Banyuwangi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan, penetapan kawasan-kawasan strategis, mengupayakan keberlanjutan areal pertanian serta perencanaan alih fungsi lahan.

Tantangan kewilayahan pada masa yang akan datang adalah pengaturan tata ruang kewilayahan harus mengacu pada pembangunan berkelanjutan secara proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan. Dalam upaya menjaga konsistensi ketata ruangan di masa yang akan datang diperlukan berbagai langkah sebagai berikut: (a) menegakkan disiplin dan aturan hukum yang memikat kepada seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha; (b) meningkatkan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang antar level pemerintah daerah kabupaten kota, maupun level pemerintahan di atasnya yaitu Provinsi Jawa Timur dan pemerintah

pusat; (c) Meningkatkan kompetensi kinerja aparat pengendali tata ruang dan pertanahan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat; dan (d) meningkatkan pengawasan yang efektif melalui sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi yang jelas.

Selanjutnya, tantangan yang tidak kalah beratnya adalah mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan dan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu tujuan utama yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah adalah dengan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan perlu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip komprehensifitas, integritas, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas ketimpangan wilayah antar daerah, disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan, terciptanya keserasian pemanfaatan ruang, peningkatan pengembangan wilayah pesisir, wilayah tertinggal serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

## **7. Politik**

Tantangan terberat yang dihadapi dalam kurun waktu 20 Tahun mendatang dalam bidang politik adalah membangun kematangan budaya politik masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang mengedepankan semangat toleran dan demokratis serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan personal institusi politik di daerah. Selain itu, lemahnya institusi politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik maupun yang berada di tataran infrastruktur politik akan berdampak pada tingkat partisipasi bangunan kepercayaan publik pada kelembagaan politik di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kemampuan dan komitmen partai politik dan lembaga perwakilan politik di daerah untuk membangun komunikasi politik yang lebih intensif dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas politik. Dalam upaya membangun semangat multikulturalisme dalam politik di daerah, tantangan utama yang masih dihadapi ke depan adalah masih mengentalnya fenomena etnisitas atau primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah.

## **8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan, hukum, dan keadilan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

## 9. Hukum

Permasalahan dalam bidang hukum diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat masyarakatan dan pendidikan hukum dalam arti luas dan pengelolaan informasi hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Adanya struktur kelembagaan hukum adat yang berbeda-beda dan belum proporsional dalam membantu kinerja penegakan hukum positif, bahkan terjadi benturan dengan hukum positif akan berdampak pada fluktuasi perekonomian yang ditunjukkan dengan perubahan investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Tantangan bidang hukum dalam 20 tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan supremasi hukum yang adil tanpa pandang bulu bagi setiap masyarakat (*justice for all*). Selain itu, bagaimana mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat serta aparat terhadap hukum. Indikasi dari keberhasilan hal tersebut adalah semakin menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparat.

## 10. Aparatur

Tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah daerah adalah pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menuntut pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggungjawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatannya. Sumber penerimaan daerah yang utama perlu diefektifkan pemungutannya. Sementara itu, pembiayaan pembangunan perlu dioptimalkan pada peningkatan pelayanan publik dan penyediaan prasarana dan sarana.

Selain itu, salah satu tantangan paling penting berkaitan dengan sumber daya manusia aparat pemerintah Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada masalah bagaimana mengembangkan sistem perencanaan SDM aparat sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Begitu juga halnya dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparat pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, perlu juga mengembangkan kemampuan dalam sistem perencanaan SDM aparat sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Selanjutnya bagaimana memperbaiki lemahnya upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparat pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selanjutnya, belum adanya evaluasi secara komprehensif dan kajian akademis terhadap berbagai peraturan daerah serta kurang terbangunnya koordinasi dalam membuat berbagai perangkat regulasi di daerah menyebabkan kurang terbangunnya sinergisitas normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan aparat daerah dalam mengadaptasi penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik masih cukup lamban.

Dalam konteks kelembagaan, persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan

tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Tantangan selanjutnya adalah masih kurangnya fungsi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif. Sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif dengan membangun suatu sistem monitoring dan pengawasan dengan sebaik mungkin.

## **11. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang relatif besar di sektor sumber daya alam. Namun demikian, tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana mengelola sumberdaya tersebut secara berkelanjutan dengan tiga pilar, yaitu secara ekonomi *feasible*, secara sosial *acceptable* dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan menggunakannya secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri.

Pendapat dan pandangan masyarakat diatas tentu saja sangat tidak sesuai, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan dan keserakahan. Lebih lanjut, tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup jangka panjang yang perlu diwaspadai adalah ancaman 3 macam krisis, yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Eksploitasi sumber daya alam yang kurang bijaksana akan menimbulkan dampak negatif kelangsungan pembangunan, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Pada sisi pemanfaatan sumber daya, khususnya berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas, serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui pendekatan agribisnis mengalami berbagai tantangan seperti (a) Pemanfaatan sumberdaya pertanian masih belum optimal; (b) Keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal; (c) Masih rendahnya ketersediaan input produksi pertanian, terutama benih dan pupuk, (d) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar pertanian, seperti pengairan/irigasi dan jalan usaha tani/jalan desa, (e) Masih lemahnya pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna yang sesuai dengan karakteristik pertanian setempat (lokal), (f) Masih rendahnya diseminasi teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian, (g) Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi pasar dan kelembagaan pembiayaan pertanian; (h) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil/kerusakan pasca panen dan masih rendahnya mutu produk, sehingga sangat dimungkinkan

terjadinya peningkatan nilai tambah melalui perbaikan pasca panen dan mutu produk; dan (i) Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pasar dalam bentuk produk olahan akhir, selama ini pasar produk pertanian masih didominasi oleh komoditas primer.

Selain itu, dengan meningkatnya populasi penduduk yang semakin pesat, menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, serta menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian yang kurang bijaksana mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air.

Sehingga ke depan diperlukan suatu langkah riil dan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang selalu memelihara dan menjaga keserasian dan kelestariannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah reformasi kebijakan dalam penanganannya, peningkatan kesadaran masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu akan pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan berbagai forum kemasyarakatan yang ada. Selain itu, penegakan hukum yang kuat akan memberikan efek jera kepada para pelaku perusakan alam sehingga yang diperlukan adalah aturan hukum yang jelas dan pasti.

## **B. Isu Strategis**

Isu strategis pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Adapun isu strategis yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan adalah:

1. Posisi wilayah Kabupaten Banyuwangi yang strategis;  
Kabupaten Banyuwangi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki letak yang strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa yang akan datang atau bisa juga sebagai poros dan penyanggah perekonomian Provinsi Bali. Sehingga isu strategis ke depan adalah bagaimana membangun Kabupaten Banyuwangi sebagai poros baru pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada serta melakukan perencanaan pembangunan terpadu dengan daerah sekitarnya.
2. Potensi Pertanian dalam arti luas yang sangat besar dan belum teroptimalkan;  
Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan apabila Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur dan nasional. Di samping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan kondisi tersebut maka

pengembangan sektor pertanian dalam arti luas melalui agribisnis dapat dijadikan andalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, pembangunan pertanian tersebut bukan tanpa hambatan maupun tantangan. Misalnya, alih fungsi lahan pertanian basah menjadi perumahan menjadi permasalahan tersendiri yang perlu ditangani melalui kebijakan yang tegas dalam menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, tantangan ke depan adalah berkurangnya sumber-sumber air (berkurang dari 333 sumber air) untuk mendukung pertanian sebagai akibat pembukaan lahan baik untuk pemukiman maupun pertanian tanpa memperhatikan keselarasan lingkungan. Oleh karena itu, dapat dilakukan berbagai hal untuk menangani hal tersebut misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan air dengan pemberdayaan HIPPA, peningkatan kepedulian terhadap pemanfaatan air sejak dini (usia sekolah), serta mengatur penggunaan air agar tidak terjadi konflik penggunaan air. Sehingga ke depan isu yang perlu dimunculkan terkait pembangunan pertanian harus juga memperhatikan keseimbangan alam atau lingkungan.

Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

3. Pengelolaan potensi alam yang belum dioptimalkan secara komprehensif dan berwawasan lingkungan;

Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi alam yang sangat besar baik darat maupun lautnya. Potensi alam darat yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah area kawasan hutan yang mencapai 183.396,34 ha ( $\pm 31,72$  persen). Hal ini dapat dioptimalkan menjadi kawasan wisata alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keserasian lingkungan. Selain itu, bentangan pantai yang cukup panjang kurang lebih 172 km, dalam perspektif ke depan pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Sehingga dengan berbagai potensi diatas dapat dikembangkan menjadi pusat wisata alam (*ecotourism*) dengan tetap memperhatikan keselarasan lingkungan.

4. Keragaman budaya Kabupaten Banyuwangi merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan;

Seperti yang telah dibahas pada uraian sebelumnya, bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai adat istiadat, budaya serta nilai-nilai keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sehingga keragaman budaya dan adat istiadat dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan.

5. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat;

Kondisi penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 sejumlah 1.587.403 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,22 persen dan tingkat kepadatan 275 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin berkembangnya Kabupaten Banyuwangi maka semakin banyak pula kesempatan kerja yang dibutuhkan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat apabila tidak dikelola secara baik akan menjadi permasalahan baru bagi Kabupaten Banyuwangi. Isu strategis ke depan adalah merencanakan jumlah penduduk secara baik dan terencana melalui berbagai program seperti, Program Keluarga Berencana (KB), Program Transmigrasi, serta program

lainnya yang terkait dengan peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat.

Selain itu, isu strategis dalam hal kependudukan adalah perlunya peningkatan pelayanan dan pendaftaran penduduk yang berbasis teknologi informasi seperti SIAK *online* dan NIK, serta peningkatan regulasi dan fasilitasi terhadap persebaran dan pemerataan penduduk dalam upaya mengantisipasi mobilitas penduduk yang tinggi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka perlu perencanaan pemberdayaan/pembangunan sumberdaya manusia secara berkelanjutan melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dalam sektor pendidikan tidak hanya melalui sektor formal, tetapi dapat dilakukan melalui pendidikan informal dan vokasi untuk pengembangan kemampuan masyarakat.

6. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat;  
Perkembangan perekonomian Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun dapat diketahui dari laju pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 4,58 persen pada tahun 2005 menjadi 6,04 persen pada tahun 2009. Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi di atas 5 persen. Padahal pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008, pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia sempat tertekan akibat kenaikan harga BBM dunia yang pada akhirnya mendorong naiknya harga BBM, barang dan jasa di dalam negeri. Pada kurun waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi justru mengalami kenaikan, meskipun agak lambat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Namun demikian, isu pembangunan daerah ke depan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga dari sisi pemerataannya (*equity*). Kesejahteraan masyarakat secara luas tidak hanya akan terwujud dengan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi perlu redistribusi pendapatan secara merata ke setiap masyarakat. Sehingga hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
7. Perkembangan MDGs, globalisasi dan perdagangan bebas  
Isu strategis pembangunan daerah kedepan harus juga memperhatikan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs). Setidaknya ada delapan sasaran yang harus dicapai
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
  - b. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
  - c. Mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan,
  - d. Menurunkan angka kematian anak,
  - e. Meningkatkan kesehatan ibu,
  - f. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,
  - g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan
  - h. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Selain hal diatas, isu strategis kedepan adalah globalisasi dan perdagangan bebas. Setidaknya kawasan perdagangan bebas *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003 telah diberlakukan, perdagangan bebas ASEAN dan China (CAFTA) tahun 2010, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010 dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang menjadi dasar pelaksanaan



WTO (*World Trade Organization*). Sehingga diperlukan berbagai langkah strategis dan komprehensif untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut.

#### 8. Kebijakan Energi Nasional

Isu strategis ke depan terkait energi adalah terkait Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sedangkan sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah:

- a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 ( $< 1$ ) pada tahun 2025;
- b. Terwujudnya energi (printer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional:
  - (1) Minyak bumi menjadi kurang dari 20 persen;
  - (2) Gas bumi menjadi lebih dari 30 persen;
  - (3) Batubara menjadi lebih dari 33 persen;
  - (4) Bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5 persen;
  - (5) Panas bumi menjadi lebih dari 5 persen;
  - (6) Energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya *biomassa*, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5 persen; dan
  - (7) Batubara yang dicairkan (*liquefied coal*) menjadi lebih dari 2 persen.

Adanya peraturan tersebut mengharuskan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk merespon secara baik dan berkelanjutan mengingat peranan energi sangat penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

#### 9. Kinerja lingkungan hidup dan reformasi agraria

Setidaknya terdapat tiga isu utama lingkungan hidup yaitu pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas kinerja lingkungan hidup. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu saja pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mensinkronkan kebijakan kedepan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain hal diatas, isu strategis reformasi agraria menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Selama ini hambatan politis dan rendahnya usaha reformasi agraria menjadikan reformasi ini masih berjalan ditempat. Sehingga ke depan perlu dilakukan persepatan reformasi agraria secara tepat dan terpadu.

#### 10. Permasalahan penyakit baru yang muncul

Perkembangan kehidupan manusia semakin dinamis, yang disertai dengan daya dukung lingkungan yang semakin menurun menyebabkan ketidak-harmonisan sistem kehidupan antara alam dan manusia. Hal tersebut menyebabkan adanya kecenderungan meningkatnya kasus-kasus penyakit non infeksi *cardiovascular* dan penyakit *degenerative*, serta berkembangnya penyakit "*new emerging disease*". Sementara itu, penyakit-penyakit infeksi masih belum menurun, pengidap HIV/AIDS yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya dengan potensi lokalisasi yang cukup besar merupakan tantangan yang masih harus dihadapi. Oleh karena itu, isu beban ganda penyakit infeksi dan non infeksi harus menjadi perhatian, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat dalam upaya mencegah dan mengobati berbagai penyakit yang ada.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

#### **A. Visi**

Perumusan visi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena visi mencerminkan keadaan yang diharapkan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan visi dapat dilakukan melalui cara pengumpulan informasi mengenai keadaan daerah yang bersangkutan melalui informasi normatif, informasi visioner dan informasi teknis.

Sesuai dengan hasil identifikasi kondisi faktual Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan dengan mencermati permasalahan pembangunan, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi selama dua puluh tahun ke depan. Tantangan tersebut selain merupakan peluang dan harapan, juga dapat menjadi permasalahan dan ancaman yang harus dicari solusinya, sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi.

Sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yaitu mensejahterakan masyarakat lahir dan batin, strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi memposisikan sektor pertanian yang merupakan kontributor utama dalam perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Oleh sebab itu, Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi menempatkan perekonomian yang bertumpu pada pembangunan agroindustri pertanian. Kondisi tersebut menjadi landasan dan modal dasar serta titik awal guna menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan pada 20 tahun ke depan.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sasaran pembangunan bukan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan kualitas SDM menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, dengan lebih mengedepankan peranannya sebagai subjek pembangunan daripada obyek pembangunan, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam semua proses kegiatan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), serta aspek ekonomi (daya beli) maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Meningkatnya kualitas SDM, diharapkan mampu mengelola potensi daerah secara optimal, memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan yang menjadi *guidelines* dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu bentuk tahapan perencanaan pembangunan itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 (dua puluh) tahunan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

**Visi**  
***Kabupaten Banyuwangi yang Religius, Sejahtera dan Mandiri Berbasis Agrobisnis dan Ekowisata Terpadu***

### **RELIGIUS**

Religius mempunyai makna perwujudan perilaku masyarakat yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang religius berarti pula perwujudan perilaku yang berakhlak mulia, yang bertaqwa kepada Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan inter dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah Kabupaten Banyuwangi dan budaya Bangsa Indonesia, serta memiliki kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Banyuwangi dan masyarakat Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.

### **SEJAHTERA**

Sejahtera mempunyai makna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Banyuwangi baik secara lahir maupun batin. Masyarakat yang sejahtera merupakan wujud dari masyarakat yang adil dan makmur, dalam konotasi adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, baik dari sisi materiil maupun spiritual. Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Kesejahteraan masyarakat tidak akan ada tanpa keadilan; begitu pula keadilan yang tidak mensejahterakan bukanlah suatu hal yang tepat. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama yang dimiliki oleh masyarakat baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, baik sebagai perencana pembangunan maupun penikmat hasil pembangunan. Intinya adalah pembangunan tersebut harus berlandaskan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat.

Kesejahteraan harus juga tercermin dalam semua aspek kehidupan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian akan terbentuk masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

### **MANDIRI**

Mandiri bermakna bahwa memiliki kemampuan untuk menentukan nasib dan masa depannya tanpa tergantung pada pihak lain. Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Banyuwangi mengatur dan mengurus daerah dan rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Mandiri bermakna pula kemampuan untuk membangun daerah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki dengan berbagai aspek keunggulannya dengan tetap menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain. Kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dengan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki.

### **AGROBISNIS**

Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu berkembang menjadi kabupaten yang aktivitas utama ekonominya berbasis agrobisnis yang bertumpu pada sektor budi daya (*on farm*) sampai hilir (*off farm*) diikuti dengan pengembangan agroindustri, yang didukung kondisi pasar, permodalan, infrastruktur, lembaga perbankan dan non bank, kelembagaan petani, pendidikan dan pelatihan, BUMD, manajemen sehingga mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kinerja agrobisnis sebagai sistem akan menjadi pilar utama untuk menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik. Berbagai produk agrobisnis harus memiliki kualitas dan konsistensi pengembangannya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing di tingkat nasional dan global untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pelaku agrobis, khususnya petani.

### **EKOWISATA TERPADU**

Ekowisata terpadu merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan perekonomian daerah yang berkesinambungan. Ekowisata terpadu dengan kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Disamping itu terdapat peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat.

Dari pernyataan visi diatas dilakukan pemilahan visi menjadi perwujudan visi, sebagai berikut:

- Perwujudan Visi 1: Kabupaten Banyuwangi yang Religius
- Perwujudan Visi 2: Kabupaten Banyuwangi yang Sejahtera
- Perwujudan Visi 3: Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis dan Ekowisata Terpadu

### **B. Misi**

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam usahanya mewujudkan visi. Selain itu, misi merupakan komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah yang akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi 2005–2025**

Visi	Misi
Kabupaten Banyuwangi yang Religius	Misi I.1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal
	Misi I.2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Kabupaten Banyuwangi yang Sejahtera	Misi II.1: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan SDM berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	Misi II.2: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan
	Misi II.3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan tanggung jawab
Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis dan Ekowisata Terpadu	Misi III.1: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri berbasis agrobisnis terpadu
	Misi III.2: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri berbasis Ekowisata terpadu

Penjelasan berbagai misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut

**Misi I.1: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang Religius dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kearifan Lokal**

Misi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi diharapkan senantiasa memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dicirikan oleh perilaku yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, keagungan akhlak, toleransi antar individu dan bergotong royong. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan masyarakat yaitu mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Selain itu dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal yang diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, serta memelihara kerukunan inter dan antar umat beragama.

Hal tersebut sangat diperlukan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi yang mengakibatkan arus globalisasi semakin deras, sehingga batas ruang dan waktu antar wilayah makin kabur. Salah satu dampak globalisasi adalah masyarakat semakin mudah mengenal nilai-nilai kehidupan yang berasal dari budaya luar (asing), tanpa terkecuali masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Akibatnya, terjadi akulturasi dan asimilasi budaya, dimana nilai budaya lokal akan mengadopsi nilai budaya asing. Hal ini tidak menjadi suatu masalah sepanjang nilai-nilai budaya asing tersebut berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Hal yang perlu diantisipasi adalah ketika nilai-nilai budaya asing tersebut justru mereduksi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah berkembang di masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Ancaman penurunan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, terutama dihadapi oleh generasi muda Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini tercermin dari perilaku sebagian besar pemuda yang kurang memperhatikan norma-norma sosial dan nilai-nilai keagamaan. Generasi muda Kabupaten Banyuwangi lebih mudah menerima budaya asing yang sarat dengan nilai-nilai hedonistik dan individual.

Padahal, sebagaimana diuraikan di atas, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal memiliki kontribusi positif bagi pembentukan modal sosial, yang juga diperlukan bagi pembentukan masyarakat madani di Kabupaten Banyuwangi. Modal sosial tidak akan berkembang bahkan akan terancam hilang apabila kehidupan masyarakat kental dengan nilai-nilai hedonistik dan individual. Modal sosial hanya akan tumbuh dan berkembang ketika terdapat rasa kebersamaan yang kuat diantara anggota suatu komunitas atau masyarakat.

Memperhatikan manfaat dari modal sosial bagi pembangunan, serta melihat kondisi terdegradasinya nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal di masyarakat Kabupaten Banyuwangi, terutama untuk generasi muda, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinisiatif untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Sebagai suatu inisiatif, tentunya kebijakan pemerintah dalam membangun modal sosial memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama institusi-institusi sosial dan keagamaan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan merumuskan kebijakan yang ditujukan bagi pemberdayaan institusi-institusi tersebut (misal: lembaga keagamaan, lembaga sosial dan lembaga kepemudaan) agar dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melestarikan serta mengembangkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Harapannya, agar gerak langkah kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuwangi senantiasa lekat dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan membangun pemaknaan masyarakat terhadap hakikat yang terkandung di dalamnya. Harapannya, tindakan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, tidak sebatas memenuhi kewajiban, akan tetapi mereka diharapkan memahami hakikatnya, sehingga manfaat atas amalan-amalan tersebut lebih efektif dalam membangun modal sosial.

#### **Misi I.2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan agar interaksi sosial dapat berlangsung normal, sehingga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan kebutuhan hidup manusia dapat tumbuh dan berkembang, misalnya aktivitas ekonomi dan budaya. Sumber ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni: perilaku manusia (*man made*) dan fenomena alam (*nature disaster*).

Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh perilaku manusia, dapat diminimalisir ketika interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku, atau dengan kata lain supremasi hukum dapat diwujudkan. Karakter masyarakat, institusi sosial dan figur publik memiliki peran penting bagi upaya untuk mewujudkan perilaku manusia yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi memiliki karakter agamis yang senantiasa memperhatikan nilai-nilai agama dalam setiap gerak langkah hidupnya. Kondisi ini semakin diperkuat dengan mantapnya fungsi dan peran institusi sosial keagamaan (misal, pondok pesantren), dalam mengarahkan tindakan anggota masyarakat agar selaras dengan ajaran agama. Disamping itu, masyarakat Kabupaten Banyuwangi cenderung memiliki tokoh agama yang mereka jadikan figur dalam setiap tindakannya.

Kondisi masyarakat di atas merupakan faktor pendukung bagi upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan supremasi hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Semangat pembangunan yang partisipatif, mendasari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melibatkan institusi sosial dan figur publik agar percepatan pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai.

Sebagai upaya untuk mengelola resiko yang ditimbulkan oleh bencana alam, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang merugikan bagi keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah membentuk satuan tugas penanggulangan bencana di setiap kecamatan yang ditunjang dengan pembentukan tim SAR (*search and rescue*) Kabupaten Banyuwangi juga Pasukan Pemadam Kebakaran (damkar) Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu, penanganan bencana alam juga melibatkan PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banyuwangi, Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menjalin kerja sama secara aktif dengan jajaran institusi militer dan institusi kepolisian se-Kabupaten Banyuwangi, dalam format Bapeltibda, untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat yang mendukung pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

### **Misi II.1: Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat Berasas Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan manusia diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya yang dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan memberikan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran.

Aktivitas manusia, terutama aktivitas produktif di bidang ekonomi, turut mempengaruhi kualitas lingkungan. Perilaku manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, akan menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) akan terancam, karena daya dukung lingkungan tidak sebanding dengan kebutuhan untuk menunjang aktivitas manusia. Ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan akan berpotensi menurunkan kualitas kehidupan manusia itu sendiri.

Sehingga misi ini menekankan pada perwujudan kualitas hidup masyarakat akan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang berkualitas hidup baik merupakan modal dasar pembangunan untuk melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

### **Misi II.2: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Infrastruktur sosial dan ekonomi merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk menjamin ekonomi sektor publik dan swasta, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah, puskesmas dan rumah sakit. Adapun infrastruktur ekonomi adalah segala fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa, yang dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku, distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Infrastruktur tersebut berupa infrastruktur fisik yang mendukung jaringan struktur seperti jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, serta pelabuhan.

Ketersediaan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya terdapat dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, namun juga dalam pembangunan infrastruktur sosial. Dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan berimbas pada peningkatan aktivitas ekonomi secara langsung atau sebagai dampak



*multiplier effects*, sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

Selain itu dengan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan yang diindikasikan oleh meningkatnya pembangunan wilayah, berkurangnya kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, tersedianya akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

### **Misi II.3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Profesional dan Tanggung Jawab**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdiri pada tiga pilar utama, yakni Pertama, prinsip partisipasi yang menghendaki terakomodasinya aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam berbagai tahapan pembangunan. Kedua, prinsip transparansi yang mempersyaratkan adanya akses bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh segala informasi terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Ketiga, prinsip akuntabilitas yang menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadapi kendala pada keterbatasan sumber daya, sehingga tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang publik tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa masyarakat adalah subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga mereka lebih memahami permasalahan pembangunan lebih dari siapapun. Menimbang dua hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan berbagai mekanisme untuk menjaring partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, antara lain dengan mengadakan forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Keterbukaan (transparansi) merupakan salah satu alat untuk memastikan (*controlling*) bahwa pembangunan telah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fungsi kontrol tersebut, sekaligus juga berperan sebagai pengingat dini (*early warning tools*) terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pembangunan.

Misal, penyediaan *web site* <http://www.Banyuwangikab.go.id> dan media masa elektronik dan cetak.

Sebagai pihak yang telah mengamanatkan aspirasinya dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi, maka masyarakat melalui lembaga perwakilan daerah, memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Transparansi merupakan perangkat untuk

memonitor pembangunan, sedangkan akuntabilitas merupakan perangkat untuk mengevaluasi hasil akhir pelaksanaan pembangunan. Terdapat beragam mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik, diantaranya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan lain-lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam misi ini adalah ingin mewujudkan kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang semakin meningkat yang didukung oleh peningkatan profesionalisme aparatur daerah, aparatur anti suap dan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum yang berkualitas, peningkatan tanggung jawab aparatur daerah dengan sistem *reward* dan *punishment* yang jelas dan terukur, penguatan kelembagaan lokal yang dapat mengadaptasi berbagai dinamika perubahan keinginan dan kebutuhan masyarakat, serta berperan secara aktif dalam pembangunan yang semakin dinamis. Selain itu, peningkatan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.

#### **Misi III.1: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis Terpadu**

Sebagian besar penduduk Kabupaten Banyuwangi mengandalkan aktivitas ekonomi sektor primer sebagai sumber mata pencaharian, terutama sub sektor pertanian pangan, peternakan dan perikanan. Pembangunan pertanian mencakup sub-sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Bidang pertanian selama ini masih mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effects* yang besar, karena sekitar 40 persen masyarakat Kabupaten Banyuwangi menggantungkan hidupnya di sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah petani. Oleh karena itu keberpihakan pada petani merupakan keharusan dengan tetap memperhatikan kemajuan di sektor pertanian itu sendiri khususnya dalam pembangunan agrobisnis. Sehingga petani tidak diposisikan sebagai pekerja maupun buruh, akan tetapi ada suatu pemberdayaan terhadap petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian diupayakan sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat sebagai penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agrobisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis, selain itu sektor pertanian masih menjadi penopang agar krisis ekonomi tidak berkelanjutan. Peningkatan usaha pertanian harus didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk menjadikan pertanian Kabupaten

Banyuwangi menjadi salah satu pusat pertanian Jawa Timur terutama untuk pengembangan komoditi hortikultura. Selain itu, perlu dilakukan pengetatan kebijakan untuk menahan laju konversi lahan pertanian yang terus mengancam seiring dengan peningkatan kebutuhan lahan permukiman dan peningkatan sektor industri dan jasa yang tentunya membutuhkan lahan untuk perkantoran dan tempat produksi.

Secara umum kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto sangat besar dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 49 persen. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan penyerap tenaga terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan relatif rendah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas yang antara lain disebabkan oleh pergantian pola musim, masalah pupuk, masalah menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, rendahnya akses ke sumber daya produktif, belum optimalnya sistem penyuluhan, penurunan sistem irigasi (kuantitas dan kualitas), serta terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali.

Potensi peternakan di Kabupaten Banyuwangi cukup besar yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya produksi budidaya sapi perah dan sapi potong, kambing, ayam ras potong dan ayam ras petelur, sehingga konsumsi protein asal ternak perlu ditingkatkan.

Di bidang kehutanan, Kabupaten Banyuwangi memiliki sumberdaya hutan seluas 11.227 Ha atau meliputi hampir kurang lebih 56,4 persen dari luas wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan potensi yang memadai, namun demikian keberadaan kawasan hutan tersebut belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Kondisi sumberdaya hutan tersebut secara umum telah dan sedang mengalami proses degradasi fungsi secara serius baik disebabkan oleh penjarahan, perambahan, maupun kebakaran, sehingga ini merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Dengan kondisi eksisting seperti itu, maka keunggulan atau daya saing Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan melalui pengembangan pertanian secara luas melalui sistem agrobisnis terpadu. Hal ini juga sejalan dengan visi Provinsi Jawa Timur yaitu menjadi provinsi dengan agrobisnis terkemuka.

### **Misi III.2: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Ekowisata Terpadu**

Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi dan kondisi alam yang sangat besar. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782.50 km<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur yang diikuti oleh Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Tuban. Sebagian besar wilayah daratan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan hutan seluas 183.396,34 ha atau

31,62 persen. Sedangkan lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen, perkebunan seluas 82.143,63 ha atau 14,21 persen, permukiman seluas 127.454,22 ha atau 22,04 persen, sisanya untuk jalan, ladang dan penggunaan lainnya. Selain itu, wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 175,8 km dan mempunyai 10 pulau. Kondisi yang demikian dengan begitu sangat potensial untuk dijadikan lahan sumber daya alamiah dalam pengembangan potensi ekowisata khususnya kehutanan mengingat luas lahan hutan yang masih mayoritas dan ditunjang dengan garis pantai panjang dengan 10 pulau pendukung.

Selain itu, dengan kondisi geografis yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan berdekatan dengan Pulau Bali maka akan semakin menambah nilai jual akan permintaan pariwisata yaitu dengan batas wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, selatan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara  $7^{\circ} 43'$  -  $8^{\circ} 46'$ : Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 53'$  -  $114^{\circ} 38'$  Bujur Timur. Sedangkan secara lebih rinci, wilayah daratannya merupakan dataran tinggi berupa pegunungan, dataran rendah, garis pantai, semenanjung, serta teluk.

Sedangkan topografi wilayah bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Dengan tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara  $40^{\circ}$ , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari  $15^{\circ}$ , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga tingkat kesuburan tanah sangat terjaga. Selain itu, faktor lain yang menjaga tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya sungai yang selalu mengalir dalam sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS yang terbentang di dataran rendah dari wilayah selatan hingga utara. Beberapa sungai panjang yang mengalir adalah Sungai Bindo, Baru Manis, Probolinggo, Bajul Mati, Tambang, Budeng, Menggarang, Setail dan Sungai Kali Baru.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa kondisi geografis di Kabupaten Banyuwangi merupakan kekuatan dalam pengembangan wisata khususnya ekowisata (*ecotourism*). Dimana Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat, dengan memperlihatkan kesatuan konsep yang terintegratif secara konseptual tentang keseimbangan antara menikmati keindahan alam dan upaya mempertahankannya. Sehingga pengertian ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Namun demikian, pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi bukan tanpa kendala, diantaranya adalah *trend* wisata ke Bali berkembang ke Timur (NTB), tetapi tidak berkembang ke barat (Kabupaten Banyuwangi). Belum adanya kesadaran kolektif untuk mengembangkan pariwisata, serta belum ada integrasi antara potensi dan aspek pemasaran (paket). Selain itu, aspek lingkungan dengan pembukaan ekowisata tanpa memperhatikan keselarasan dan keserasian lingkungan akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu pengembangan kepariwisataan khususnya ekowisata sebagai salah satu daya saing Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan secara terpadu. Keterpaduan disini adalah pembangunan ekowisata harus melibatkan berbagai komponen baik pemerintah, swasta, masyarakat, PHRI, pencinta lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu perlu didukung oleh sektor-sektor terkait seperti pembangunan sarana dan prasarana wisata, pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, pengembangan wisata tersebut juga harus memperhatikan berbagai pilar pengembangan seperti infrastruktur, *empowering* (pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata, pengrajin, dan lain sebagainya), serta promosi secara baik dan komprehensif.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 adalah **"KABUPATEN BANYUWANGI YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU"** memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang jelas. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Periode pelaksanaan RPJPD sesuai dengan periode waktu RPJPN 20 (dua puluh) tahun. Pentahapan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah.

Sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan selanjutnya pada Bab V menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025. Dengan demikian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pokok sebagai berikut:

#### **A. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyuwangi 2005–2025**

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penyusunan sasaran pokok merupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi agar apa yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan. Dengan diterjemahkannya tiap-tiap pokok visi ke dalam misi, maka berbekal penjelasan masing-masing misi dibuat sasaran pokok.

Selanjutnya, sasaran pokok tersebut digambarkan ke dalam pembangunan lima tahunan melalui arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja (beserta target kinerjanya) yang menjelaskan sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun untuk menjembatani bagaimana kinerja 20 (dua puluh) tahun tersebut, akan dicapai tiap tahapannya dalam 5 (lima) tahun, maka dibuatlah arah kebijakan. Arah kebijakan pada hakekatnya merupakan sasaran pokok mengenai masalah yang dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 20 tahun ke depan disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang pada tahun 2025, dengan memperlihatkan indikator keberhasilannya pada setiap periode lima tahun. Untuk menjamin terjadinya

keterkaitan antara Visi, Misi dan Arah Pembangunan, maka Arah Pembangunan Jangka Panjang yang didasarkan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi**

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
<p><b>Misi I. 1: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang Religius dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kearifan Lokal</b></p>	<p>1. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang dicirikan oleh perilaku yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketinggian akhlak dan toleransi antar individu.</p>	<p>1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjamin kebebasan dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>2. Pembentukan jati diri masyarakat diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang kuat, berbudi pekerti luhur, beretika, beradab, serta mempunyai toleransi yang tinggi antar individu dan masyarakat;</p> <p>3. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antarumat beragama;</p> <p>4. Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;</p> <p>5. Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antar umat beragama pada proses pembangunan;</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; serta</p> <p>7. Meningkatkan peranan dan fungsi tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah.</p>
<p><b>Misi I. 2: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b></p>	<p>1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p>	<p>1. Pembangunan ketertiban masyarakat maupun pertahanan dan keamanan daerah yang tangguh ditujukan terutama diarahkan pada keterlibatan TNI/Polri dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dan mempererat hubungan kerjasama antara masyarakat dengan aparat TNI/Polri. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum oleh aparat Polri diarahkan pada bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan, bimbingan dan pelatihan ketertiban lalu lintas, pencegahan penggunaan obat-obat terlarang dan bahan psikotropika, pemberantasan tindak kriminal, peningkatan daya tanggap terhadap aduan</p>



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		<p>masyarakat, pelayanan administrasi yang cepat, efektif dan murah, maupun pencegahan praktek pungutan ilegal; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan perwujudan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan diarahkan dengan memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan serta membentuk perilaku masyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dibarengi dengan dukungan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang murah.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan oleh sikap saling toleransi antar individu serta terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan melalui berbagai forum kemasyarakatan dan sistem serta nilai luhur yang ada di masyarakat. Hal ini diarahkan untuk terciptanya pembangunan yang harmonis dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila;</li> <li>2. Peningkatan budaya dan kesadaran politik untuk generasi muda diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan dan patriotisme serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas kebangsaan yang kuat; dan</li> <li>3. Pendidikan politik diarahkan untuk terwujudnya kesadaran berpolitik masyarakat dan terjaminnya hak-hak politik secara proporsional dalam koridor hukum dan menjunjung nilai-nilai Pancasila.</li> </ol>
<p><b>Misi II. 1: Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat Berasas Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi terhadap pendidikan yang berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan untuk mewujudkan SDM yang secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya dengan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;</li> </ol>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan pendidikan, baik pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, diarahkan pada peningkatan kompetensi dasar masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Banyuwangi; dan</li> <li>3. Pembangunan Iptek mencakup upaya penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan terapan, pengembangan ilmu sosial dan humaniora bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pengembangan teknologi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan kemandirian dan daya saing penduduk dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama, etika, kearifan lokal serta daya dukung dan kelestarian lingkungan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular khususnya HIV/AIDS, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan;</li> <li>2. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud;</li> <li>3. Peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan melalui kemitraan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat; dan manajemen kesehatan; dan</li> <li>4. Peningkatan upaya kesehatan pada komunitas khusus (ibu, bayi, balita, lansia, dan kelompok miskin).</li> </ol>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	<p>3. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha sehingga mampu bersaing di era global;</li> <li>2. Pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal dilakukan melalui pendidikan dan keterampilan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai latihan kerja daerah; dan</li> <li>3. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dilakukan melalui peningkatan ketrampilan teknis usaha perekonomian skala lokal, pembukaan lapangan kerja baru, pengadaan tenaga kerja di sektor industri maupun pendidikan dan pelatihan khusus bagi tenaga satuan pengamanan dan polisi pamongpraja. Upaya untuk mewujudkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam memecahkan tingkat pengangguran terbuka.</li> </ol>
	<p>4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, diarahkan dengan memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan;</li> <li>2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi politik maupun prinsip-prinsip kepatutan yang ada; dan</li> <li>3. Pemberdayaan perempuan berupa peningkatan wawasan, ketrampilan, pembinaan dan pendampingan kelompok usaha ibu-ibu rumah tangga di perdesaan harus menjadi program kerja lintas sektor dan instansi pemerintah.</li> </ol>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	<p>5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan yang berupaya untuk melestarikan dan menjaga fungsi lingkungan dalam mendukung keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kearifan lokal yang baik.</p>	<p>1. Pengelolaan sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan.</p>
<p><b>Misi II. 2: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Yang Berkelanjutan</b></p>	<p>1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain sebagainya) di seluruh wilayah.</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan aksesibilitas antar wilayah dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan;</p> <p>2. Pembangunan sarana dan prasarana secara kuantitas maupun kualitas ditujukan kepada pengembangan sistem jaringan transportasi darat, udara, laut dan penyeberangan ke Provinsi Bali serta pengembangan sistem jaringan prasarana dasar (jalan utama, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, persampahan, jaringan pos dan telekomunikasi);</p> <p>3. Peningkatan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) secara efektif terhadap pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang secara efektif dalam kerangka keserasian dan keberlanjutan, sosialisasi kebijakan penataan ruang dan rencana tata ruang, partisipasi <i>stakeholders</i> dan yang terpenting adalah koordinasi antar level pemerintahan berkaitan dengan kebijakan penataan ruang; dan</p> <p>4. Pemerataan pendapatan yang ditandai menurunnya indeks gini dan tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruh wilayah akan mengakibatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan/kampung, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat berkurang.</p> <p>5. Infrastruktur strategis antara lain Bandara Blimbingsari, Pelabuhan (penyeberangan dan pelabuhan laut), dan jalan</p>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	<p>2. Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah.</p>	<p>lintas selatan dengan segala potensinya dengan dukungan jaringan perkeretaapian terus dikembangkan untuk mewujudkan sistem transportasi terpadu antar moda dan intra moda Kabupaten Banyuwangi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang meliputi transportasi darat-laut-udara.</p> <p>1. Keterkaitan oleh tersedianya sarana dan prasarana ekonomi (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas masyarakat juga harus didukung oleh penelitian dan pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ketersediaan infrastruktur ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah. Ke depan, penyediaan infrastruktur ekonomi dilakukan oleh pihak swasta sementara pemerintah daerah hanya sebagai perumus kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah;</p> <p>2. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif untuk menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) perkembangan kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat; (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal; (c) meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah; dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat;</p> <p>3. Peningkatan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, serta</p>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		<p>peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan; dan</p> <p>4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, kawasan tumbuh cepat, pusat-pusat permukiman masyarakat dalam sistem pengembangan wilayah terpadu sebagai kesatuan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan.</p>
	<p>3. Berkembangnya kegiatan pelestarian norma dan nilai-nilai budaya daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.</p>	<p>1. Peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam membina kehidupan sosial yang aman, damai, solider, harmonis dan agamis sangat dibutuhkan pada masa depan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan agama dan adat dan peran serta tokoh-tokohnya dalam pembangunan tersebut dimulai dari hubungan koordinasi dan konsultasi antar pemerintah daerah dan tokoh-tokoh informal dalam masyarakat tersebut. Penataan dan pembinaan kelembagaan dapat berupa insentif bagi pembinaan sosial-keagamaan maupun jaminan kesejahteraan bagi para tokoh informal tersebut;</p> <p>2. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang sesuai dengan ajaran agama dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat;</p> <p>3. Melestarikan dan mengapresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional lokal, serta memberikan proteksi terhadap karya seni dan budaya; dan</p> <p>4. Pembinaan kehidupan sosial yang maju dan mandiri yang disertai dengan pembinaan internal keluarga. Pembinaan terhadap keutuhan rumah tangga yang <i>sakinah, mawadah wa rahmah</i> harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip agama (<i>syari'</i>) yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu segala</p>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	<p>5. Menguatnya modal sosial masyarakat yang dicirikan oleh kelembagaan lokal yang kuat yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.</p>	<p>bentuk praktek disharmoni keluarga dan sosial berupa perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, pelecehan seksual, perselingkuhan dan perceraian harus dicegah dengan pembinaan mental keagamaan yang sungguh-sungguh.</p> <p>1. Pengembangan kreatifitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat di segala aspek kehidupan, terutama bidang olahraga dan kesenian. Pemuda sebagai aset pembangunan di masa depan harus ditingkatkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik. Disamping itu pada bidang olahraga difokuskan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olah raga;</p> <p>2. Pembinaan ketahanan sosial antara lain sosialisasi mitigasi bencana dan pencegahan wabah penyakit serta pembinaan kemasyarakatan dan kampanye kesetiakawanan sosial. Keamajuan dan kemandirian sosial adalah terjaminnya harta dan jiwa masyarakat dari musibah dan bencana dengan asuransi. Dalam hubungan ini, setiap anggota masyarakat adalah pemegang polis asuransi harta dan jiwa;</p> <p>3.</p>
<p><b>Misi II. 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Profesional, dan Tanggung Jawab</b></p>	<p>1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah.</p>	<p>1. Pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan sosok aparatur yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa; dan</p> <p>2. Perubahan secara bertahap terhadap paradigma dan budaya birokrasi agar cepat, tanggap dan peduli dalam merespon tuntutan, kebutuhan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.</p>

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	<p>2. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efisiensi dan efektifitas urusan birokrasi tersebut dilaksanakan melalui pelayanan terpadu dengan meminimalisir rantai birokrasi yang panjang. Kinerja birokrasi yang demikian itu perlu ditunjang oleh peningkatan kesejahteraan aparatur berupa gaji, tunjangan fungsional maupun struktural yang adil dan setara tanpa mencederai rasa solidaritas sosial;</li> <li>2. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) perlu dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan optimum dan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat-perangkat daerah yang selaras dan sinergis;</li> <li>3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen di masing-masing satuan kerja; dan</li> <li>4. Pelayanan publik yang prima diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang dapat dilakukan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.</li> </ol>
	<p>3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai termasuk sistem administrasi yang terintegrasi dan aksesibel untuk kelancaran pelayanan publik yang efisien dan efektif; dan</li> <li>2. Pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.</li> </ol>



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
<b>Misi III. 1: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Agribisnis Terpadu</b>	1. Berkembangnya sistem agribisnis terpadu.	1. Pembangunan pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau. Sistem agribisnis dan agrobisnis diperkuat oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh; dan 2. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumberdaya alam khususnya pertanian dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan arahan rencana tata ruang wilayah.
	2. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif termasuk struktur usahanya.	1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada peletakan dasar dan peningkatan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah dengan pengelolaan sumberdaya yang efisien dan efektif, sehingga dapat memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing global; 2. Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 3. Pengembangan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun internasional berbasis pertanian; dan 4. Keterkaitan antara struktur perekonomian, besar, menengah, mikro dan kecil tercipta melalui rantai perekonomian yang sehat dan terkluster sesuai kemampuan masyarakat pelaku ekonomi pada masing-masing struktur. Sedangkan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	3. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan.	<p>pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterpaduan dan keserasian antarsektor dilakukan dengan menempatkan sektor pertanian dalam arti luas sebagai <i>leading sector</i> dan sektor-sektor lain sebagai pendukung. Kebijakan insentif pajak dan kebijakan khusus lainnya di bidang investasi digalakkan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional;</li> <li>2. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian lokal. Sistem agribisnis diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh; dan</li> <li>3. Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan nelayan.</li> </ol>
<b>Misi III. 2: Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Ekowisata Terpadu</b>	1. Meningkatnya perekonomian Kabupaten Banyuwangi berbasis ekowisata terpadu.	1. Pembangunan Kepariwisata diarahkan pada sistem kepariwisataan berbasis masyarakat, yang bertumpu pada wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata buatan. Hal ini dikembangkan agar mampu mendorong ekonomi daerah, menggerakkan iklim investasi bidang kepariwisataan, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja;

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan kepariwisataan dengan meningkatkan dan menumbuhkan potensi wisata yang telah berkembang berdasar kearifan dan berkelanjutan serta keragaman pesona alam, potensi daerah, tradisi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat dan lingkungan untuk mendorong kegiatan ekonomi rakyat;</li> <li>3. Pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan varitas potensi unggulan pariwisata yang terpateri pada rangkaian titik-titik destinasi “segitiga berlian” yang meliputi Kawah Ijen, Pantai Plengkung, dan Pantai Sukomade, melalui keterkaitan secara terpadu antara <i>stakeholder</i> (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; masyarakat; dan pengusaha) dalam bentuk keterpaduan promosi maupun pengembangan sarana dan prasarana fisik penunjang wisata sehingga Kabupaten Banyuwangi menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW);</li> <li>4. Meningkatkan kualitas SDM insan pariwisata untuk peningkatan pelayanan dalam kerangka pikir ekowisata;</li> </ol>

## **B. Tahapan dan Prioritas**

Dalam pengimplementasian RPJPD Kabupaten Banyuwangi diperlukan suatu upaya pentahapan dan penentuan skala prioritas kebijakan yang akan diambil disetiap periodisasinya. Pentahapan RPJPD akan dilakukan dengan menjabarkan RPJPD tersebut ke dalam RPJM selama empat periode termasuk penetapan skala prioritas di masing-masing periode tersebut. Hal ini penting dilakukan karena RPJPD yang bersifat non operasional, sasaran maupun arah kebijakannya tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam periode yang sama.

Pembagian rencana pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah, harus tetap mengarah pada pencapaian visi Kabupaten Banyuwangi 2005-2025, yaitu Kabupaten Banyuwangi yang Religius, Sejahtera dan Mandiri Berbasis Agrobisnis dan Ekowisata Terpadu. Artinya, substansi visi, misi dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, namun harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun tahapan dan prioritas dari pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

### **1. RPJM 1 (2005 – 2010)**

Pembangunan tahap pertama dalam kurun waktu tahun 2005-2010 atau pelaksanaan RPJMD pertama di Kabupaten Banyuwangi merupakan kelanjutan pembangunan tahun sebelumnya. Pada tahap ini fokus pembangunannya adalah sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang proporsional dan ketersediaan obat serta pemberdayaan tenaga kesehatan tradisional yang terlatih. Aksesibilitas pelayanan kesehatan tersebut diarahkan juga pada keterlibatan seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas lingkungan yang didukung tersedianya sarana prasarana sosial dasar lingkungan.

Pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada pengembangan akses pendidikan usia dini, peningkatan indeks pendidikan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan kebijakan memperluas akses pendidikan dasar yang lebih bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Pembangunan bidang perekonomian dikembangkan dengan memperkuat ekonomi lokal dengan pengolahan potensi daerah dengan fokus utama pada peningkatan dan pemantapan produksi pertanian yang merupakan komoditas unggulan daerah dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku agrobisnis. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar yaitu: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah dengan fokus utama sektor pertanian melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi) teknologi menuju ekonomi berbasis pertanian dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui peningkatan keterampilan masyarakat

dalam mengolah hasil pertanian sehingga produk pertanian tidak seluruhnya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dilakukan penataan kelembagaan dan sistem investasi daerah sehingga memudahkan para investor dalam menanamkan modalnya dan mampu mengembangkan sektor perekonomian terutama pada sektor perindustrian dan perdagangan baik agro maupun non agro.

Selain itu pengembangan ekonomi juga diarahkan pada pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan seperti pemberian modal, pelatihan dan pengembangan usaha, dan lain sebagainya. Pengembangan UKM ini juga dapat diarahkan sebagai produk unggulan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan UMKM secara profesional membutuhkan keterlibatan aktif antara pemerintah, masyarakat, swasta dan pengusaha UMKM. Sehingga permasalahan UMKM seperti SDM yang masih rendah, terbatasnya permodalan, teknologi, pemasaran dan kebijakan pemerintah dapat diatasi dengan baik.

Dalam bidang pariwisata difokuskan pada penataan potensi pariwisata termasuk agrowisata yang telah ada, sehingga akan memberikan dampak pada perluasan kesempatan kerja. Selain itu potensi wisata alam (*ecotourism*) dapat dijadikan wisata unggulan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tidak terlepas dari keunikan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi seperti Kawah Ijen, Alas Purwo dan lain sebagainya.

Pembangunan bidang infrastruktur lebih difokuskan pada peningkatan, pemeliharaan dan pemantapan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial, budaya dan perekonomian melalui peningkatan beberapa komponen infrastruktur transportasi pada pusat-pusat pertumbuhan terutama pada sentra-sentra produksi pertanian, pemeliharaan jaringan irigasi teknis, pemulihan infrastruktur perdesaan dan pemantapan prasarana sosial dasar lingkungan.

Pembangunan bidang pemerintahan difokuskan kepada peningkatan sistem birokrasi tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menekankan kepada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan akuntabilitas aparatur. Ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparatur, meningkatnya layanan informasi publik, tertatanya kelembagaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya pemerintahan yang bebas KKN, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatnya ketentraman dan ketertiban.

Pembangunan bidang tata ruang pada tahap ini difokuskan pada pepaduserasian rencana tata ruang melalui penyusunan dan sosialisasi rencana tata ruang. Selanjutnya, pembangunan bidang pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada penataan sistem pencegahan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, melalui peran serta seluruh *stakeholders* dalam bentuk rehabilitasi dan perlindungan terhadap kawasan-kawasan lindung, termasuk kawasan sekitar mata air.

## **2. RPJM 2 (2010 – 2015)**

Berlandaskan pada implementasi, pencapaian, evaluasi dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 dan RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan dan menata kembali Kabupaten Banyuwangi di segala bidang dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penguatan perekonomian terutama pada sektor primer khususnya pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan kelautan), sehingga mempunyai nilai tambah. Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya derajat kesehatan dengan ditandai oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), meningkatnya tingkat pendidikan

masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM); serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Di bidang infrastruktur ditandai dengan infrastruktur jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional yang semakin baik; peningkatan infrastruktur irigasi teknis dan infrastruktur air minum.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tahapan pembangunan difokuskan pada peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan (ponkesdes), serta peningkatan pemberdayaan masyarakat (UKBM). Hal ini dilakukan melalui peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pemerataan sarana dan prasarana, serta menggalakan perilaku hidup bersih dan lingkungan sehat melalui peningkatan pemahaman dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga, institusi pemerintahan, institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang mulai ditanamkan sejak dini pada siswa didik dan anak-anak dalam keluarga.

Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat tahapan pembangunannya difokuskan pada pengembangan sektor industri dengan fokus utama agrobisnis yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanian yang telah dikembangkan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaran pengembangan industri mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat dengan prinsip-prinsip dasar yaitu: (a) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk; (b) Penguatan hubungan antar usaha atau antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa pendukungnya; (c) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas antara lain sarana prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi dan sarana prasarana teknologi), serta sarana prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; dan (d) menumbuhkan investasi daerah.

Sementara itu pengembangan industri non agro diarahkan pada peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar regional dan nasional, dengan difokuskan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah unggulan daerah yang telah ada serta pengembangan industri baru yang mendukung pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang mampu berperan dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja.

Dalam bidang pariwisata, dengan segala potensi wisata yang sudah diinventarisir, maka diperlukan berbagai langkah pengemasan dan pemasaran secara komprehensif dan terpadu. Pemasaran tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai *marketer* melalui sinergitas destinasi wisata melalui paket-paket wisata. Selain itu, perlu dibangun kesadaran bersama atau kolektif dari berbagai stakeholder akan pentingnya pariwisata dalam upaya meningkatkan kontribusi sektori ini terhadap kesejahteraan masyarakat maupun sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi.

Pembangunan infrastruktur pada tahap kedua lebih difokuskan pada pemantapan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung kegiatan sosial, budaya dan perekonomian yang dilakukan melalui: (a) pemantapan infrastruktur transportasi dan peningkatan komponen infrastruktur perhubungan terutama pada wilayah-wilayah prioritas dan strategis; (b) pemeliharaan jaringan irigasi teknis agar selalu dalam kondisi baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi pengembangan pertanian; (c) pemerataan jangkauan pelayanan energi di seluruh wilayah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; (d) peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi baik kabel ataupun nirkabel di seluruh wilayah; (e) peningkatan pelayanan air minum secara kualitas dan kuantitas pada wilayah non pedesaan, serta adanya fasilitasi penyediaan air minum perdesaan dengan perpipaan; (f) relokasi permukiman sebagai dampak dari rencana pembangunan strategis dan rawan bencana; (g) perbaikan rumah tidak layak huni melalui pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah; dan (h) penambahan areal layanan sampah oleh pemerintah disertai dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada serta adanya kesadaran masyarakat terutama di perdesaan dalam mengelola sampah secara bijaksana.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap kedua difokuskan pada penataan kembali sistem birokrasi pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada publik melalui penataan sistem kepegawaian, peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM, peningkatan efektivitas pemerintahan kecamatan dan desa, peningkatan ketentraman dan ketertiban, serta peningkatan proses politik dan budaya politik yang lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

Pembangunan Aspek Penataan Ruang pada tahap kedua difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut RTRW Kabupaten Banyuwangi melalui penyusunan rencana ruang yang lebih rinci baik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiap kecamatan ataupun Rencana Teknik Ruang Kabupaten (RTRK), serta mengarahkan pengembangan kawasan industri dan perdagangan pada wilayah utara.

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahap ini difokuskan pada upaya pencegahan dan pemulihan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, melalui peran serta seluruh stakeholders dalam bentuk perlindungan terhadap kawasan-kawasan lindung (termasuk kawasan sekitar mata air) agar tetap terjaga yang disertai dengan upaya pemulihan dan penyelamatan terhadap lahan-lahan kritis yang telah berubah fungsi menjadi kawasan budidaya melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) ataupun program pemulihan lainnya.

### **3. RPJM 3 (2015 – 2020)**

Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditunjukkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berbasis agribisnis berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam upaya mempertahankan dan terus meningkatkan kesehatan masyarakat, fokus pengembangan, pemantapan dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (a) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada (RS, Puskesmas dan jejaringnya); (b) peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; (c) perluasan pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; (d) merintis tumbuhnya industri farmasi dan obat yang bermutu; dan (e) meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun, ketiga fokus arah pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya, yaitu (a) dengan meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9 tahun; (b) pelaksanaan program pendidikan dasar 12 tahun; (c) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; (d) meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal Iptek; (e) berupaya mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis *Life Skill*; dan (e) Pengembangan

Sekolah Bertaraf International (SBI), serta pendidikan keterampilan non formal. Sehingga mampu menciptakan lulusan yang siap bekerja dengan keahlian khusus dan meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada sisi pembangunan ekonomi, tahapan pembangunannya difokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk (SNI, ISO) dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah sehingga menumbuhkembangkan agrobisnis maupun industri agro dan non agro serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Sehingga pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis harus dapat mensinergikan berbagai sektor baik primer, sekunder, dan sekunder, serta mensinkronisasi peran berbagai sektor lainnya secara terpadu antara pertanian, industri pengolahan dan sektor perdagangan dan jasa. Pada pengembangan UMKM diarahkan pada revitalisasi dan peningkatan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Selain itu perlu juga peningkatan UMKM dalam hal SDM, permodalan, teknologi, pemasaran dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam bidang pariwisata difokuskan dengan terus meningkatkan pembangunan pariwisata yang telah berkembang dan menggali potensi pariwisata baru yang potensial khususnya ekowisata, dengan memanfaatkan dan memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya yang ada dimiliki, meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan, serta meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi secara regional, nasional bahkan internasional

Pada tahap ketiga ini, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan dengan tetap mempertahankan kemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai, melalui: (a) peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi; (b) peningkatan jaringan irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis; (c) menjaga pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dan dunia usaha yang diikuti dengan persiapan energi alternatif/energi terbarukan; (d) berfungsinya peran media komunikasi dan informasi untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi baik untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan, sosial dan informasi lainnya; (e) mengembangkan jaringan perpipaan air minum ke wilayah non pedesaan dan terbentuknya lembaga pengelola air minum pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; (f) mengembangkan perumahan yang memenuhi standar rumah sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang pada lahan-lahan non irigasi; dan (g) perluasan areal TPA diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang dan adanya pembangunan TPS di seluruh kecamatan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga difokuskan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggara pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum dan pengormatan terhadap HAM semakin terjaga, demokrasi politik seimbang dengan budaya politik, ketentraman dan ketertiban makin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Pembangunan aspek penataan ruang pada tahap ini difokuskan dengan lebih meningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan, jasa dan perumahan, serta perwujudan pengelolaan kawasan



konservasi, pelestarian kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertanian secara berkelanjutan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan proporsi kawasan lindung pada wilayah-wilayah yang potensial untuk dijadikan kawasan lindung, terutama melalui pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap kawasan di Kabupaten Banyuwangi, melalui peran pemerintah dan partisipasi *stakeholders* disertai dengan penegakan aturan yang tegas tentang pengelolaan lingkungan serta terjadinya keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara proporsional.

#### **4. RPJM 4 (2020 – 2025)**

Berlandaskan pada implementasi, pencapaian, evaluasi dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditunjukkan untuk mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten yang religius, sejahtera, dan mandiri melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kuat berbasis agribisnis dan ekowisata terpadu yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pada RPJM ke empat ini, sistem pemerintahan telah tercipta dengan baik yang ditandai dengan terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Sumberdaya manusia Kabupaten Banyuwangi diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, toleran terhadap keberagaman umat beragama, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kuat dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor khususnya pertanian berbasis agribisnis, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa baik yang didorong oleh industri besar dan menengah maupun UMKM. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata, terstruktur serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah. Dalam pembangunan wisata, pada tahap ini merupakan tahap pemantapan ekowisata baik berbasis pedesaan maupun budaya masyarakat setempat. Pembangunan ekowisata juga diarahkan pada tahapan keberlanjutan dan kesinambungan dengan berbagai sektor lainnya yang terkait.

Dalam pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan didukung oleh teknologi; terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdayaguna; terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; tumbuhnya industri farmasi dan obat yang bermutu dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin membaik.

Pembangunan pendidikan pada tahap keempat ini merupakan perwujudan dari pemantapan pendidikan anak usia dini, tuntasnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pengembangan SMK berbasis *life skill* berbasiskan kebutuhan pasar yang didukung oleh Iptek dan penguasaan bahas asing dalam bentuk pendidikan formal berupa sekolah kejuruan ataupun pendidikan non formal berupa lembaga

pelatihan dan keterampilan, pengembangan Sekolah Bertaraf International (SBI), pengembangan dan inovasi kelembagaan pendidikan berbasis Iptek, terpenuhinya kompetensi tenaga pengajar yang berdaya saing dan berbasis Iptek, serta meningkatnya kualitas Perguruan Tinggi dengan dibuktikan oleh lulusan yang siap kerja dan mempunyai daya saing.

Pada aspek perekonomian difokuskan pada pemantapan pembangunan pada tahap-tahap sebelumnya yaitu dengan terus meningkatkan produktivitas sehingga mempunyai nilai tambah dengan meningkatkan pengolahan dengan berbasis Iptek yang ditindaklanjuti oleh pengembangan sistem pemasaran dan pengembangan sektor jasa. Upaya tersebut dilakukan melalui: (a) pengembangan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (b) mengembangkan UMKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan UMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan; (c) melakukan peningkatan daya saing industri pengolahan hasil-hasil pertanian; (d) memantapkan sektor perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah dan mutu komoditas dalam negeri dan ekspor sesuai dengan permintaan pasar; (e) meningkatkan sistem distribusi barang yang efektif dan efisien untuk terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat; (f) menguatkan jaringan perdagangan domestik dan internasional; (g) makin mantapnya iklim investasi yang ditandai dengan makin berkembangnya sektor industri dan jasa; serta (h) meningkatnya peran pariwisata dalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan infrastruktur pada tahap ini seluruhnya sudah dalam kondisi mantap, dengan diikuti oleh peningkatan dan pengembangan pada beberapa komponen infrastruktur yang menunjang terhadap perkembangan sosial, budaya dan ekonomi yang maju, mandiri dan sejahtera. Pada tahap keempat, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada upaya pengembangan berbagai infrastruktur baru yang potensial, dengan ditandai oleh: (a) adanya pengembangan beberapa infrastruktur transportasi pada wilayah yang pertumbuhannya cukup pesat; (b) lebih meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dan dunia usaha, dengan memanfaatkan energi alternatif/energi terbarukan; (c) lebih meningkatnya peran media komunikasi dan informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi baik untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan dan informasi lainnya; (d) lebih meratanya jaringan perpipaan air minum ke berbagai wilayah dan makin mantapnya lembaga pengelola air minum perdesaan; serta (e) adanya rintisan pembangunan rumah secara vertikal pada kawasan-kawasan padat penduduk sebagai antisipasi tingginya harga lahan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap keempat merupakan perwujudan (a) tata pemerintahan yang baik, dengan ditandai dengan optimalnya pelayanan kepada masyarakat (mudah, murah, cepat, tepat dan berkualitas, transparan dan sesuai aturan) sehingga dapat memberikan kepuasan yang didukung oleh sumberdaya aparatur yang berkualitas yaitu aparatur yang berilmu dan berpengetahuan, berwibawa, taat aturan dan bersih dari KKN serta menguasai kemampuan dalam pemanfaatan teknologi; (b) sarana dan prasarana pemerintah yang menunjang pelayanan kepada masyarakat terpelihara dengan baik; (c) terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan terciptanya stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (d) penegakkan hukum, proses politik dan budaya politik berjalan sebagai pelaksanaan demokrasi yang prosedural dan substansial; serta (e) partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terlaksana dengan baik.

Pembangunan aspek penataan ruang pada tahap ini diarahkan dalam rangka terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ini merupakan capaian perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan terciptanya keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui partisipasi *stakeholders* dan penegakan aturan.



Pada tahun 2025 merupakan tahun terakhir RPJPD nasional dan daerah, maka akan digunakan sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD ke-4 atau RPJPD tahap berikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur lain mengenai hal dimaksud, maka dilakukan perubahan maupun penyesuaian.

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi berlaku tahun 2005-2025. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, terutama dalam RPJMD. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bupati Banyuwangi berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
2. DPRD Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun RPJP Daerahnya, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD atau menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
4. Tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya sampai dengan tahun 2025 yang akan datang.
5. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025.

  
BUPATI BANYUWANGI  
  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS